

204

**HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - AMERIKA SERIKAT
SUATU TINJAUAN EKONOMI - POLITIK
(Priode 1980 - 1990)**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	27-04-93
Asal dari	-
Fungsinya	1 (Waktu) kelas
Harga	17.000
No. inventaris	940204 0204
No. v. as	

OLEH :

ABU TALIB SABANG

87 08 128

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1993

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - AMERIKA SERIKAT

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - AMERIKA SERIKAT
SUATU TINJAUAN EKONOMI - POLITIK
(Periode 1900 - 1990)



OLEH
ABU TALIB SABANG
87 08 128

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Dalam Jurusan Ilmu Politik/Pemerintahan
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

PADA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1993

Judul : HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - AMERIKA SERIKAT

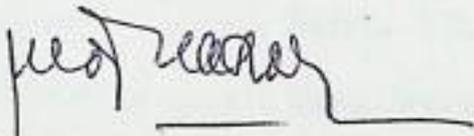
SUATU TINJAUAN EKONOMI - POLITIK
(Periode 1980 - 1990)

Nama Mahasiswa : ABU TALIB SABANG

No. Pokok : 87 08 128

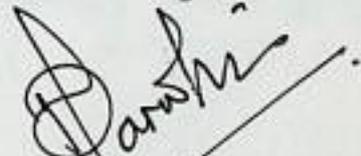
Menyetujui

Pembimbing I



Prof. DR. Mappa Nasrun, M.A.
NIP : 130 327 024

Pembimbing II



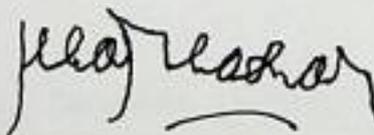
Drs. Darwis
NIP. 131 876 814

Mengetahui

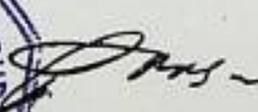
Ketua Jurusan Ilmu Politik/
Pemerintahan

Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik

Universitas Hasanuddin



Prof. DR. Mappa Nasrun, M.A.
NIP : 130 327 024



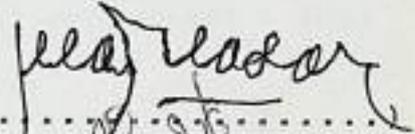
Drs. Sadly, AD, MPA.
NIP : 130 264 141

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Telah Diterima Oleh Tim Evaluasi Tesis Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

Ujung Pandang, 21 April 1993

Tim Evaluasi

Ketua : Prof. DR. Mappa Nasrun, MA. 

Sekretaris : Dra. Nurcahaya, S.H.K. (.....)

Anggota : 1. Drs. Kausar Bailusy, MA (.....)

2. Drs. A.R. Paembonan, MS (.....)

3. Drs. Sabri Dahlan... (.....)

4. (.....)

Tanggal Lulus: 21 bln... 4 Tahun 1993.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanawataala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-NYA yang diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Di dalam membahas skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya akan kekeliruan dan kekurangan yang pada dasarnya adalah kekhilafan penulis sendiri. Olehnya itu kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan.

Dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkannya sebagaimana mestinya. Adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik materil maupun moril dirasakan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itulah terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Basri Hasanuddin, Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Drs. Sadly AD, MPA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. DR. Mappa Nasrun, MA dan Bapak Drs. Darwis sebagai dosen Pembimbing I dan II dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.
5. Kepala Litbang Departemen Luar Negeri RI di Jakarta.
6. Bapak Bambang Lukito, kepala sub Bidang Tata Usaha Pada Litbang Deplu di Jakarta.
7. Bapak Soedarso, kepala Perpustakaan CSIS di Jakarta
8. Ibu W. Rustini, kepala bagian Referensi Zorinsky Memorial Library pada American Cultural Centre di Jakarta.
9. Kepala Perpustakaan FISIP Universitas Indonesia di Jakarta
10. Bapak Drs. Mansyur Semma, SIP., kepala bagian Pelayanan Perpustakaan Universitas Hasanuddin.
11. Seluruh Staff Pengajar dan bagian Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan banyak bantuannya selama ini.

Kepada Yang Tercinta Ayahanda Sabang dan Ibunda Timang sembah sujud dan ucapan terima kasih tak terhingga dan dan tulus yang tak henti-hentinya memberikan dorongan moril maupun materil kepada penulis. dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang dalam kepada seluruh kakak dan adik tercinta yang telah banyak memberikan bantuan moril

maupun materil kepada penulis.

Kepada semua pihak dan handai taulan yang tak sempat kami sebutkan satu persatu kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi imbalan yang berlipat ganda dan senantiasa meridhoi kita semua. Amin.

Ujung Pandang, 20 Nopember 1992

P e n u l i s

ABSTRAKSI

Skripsi dengan judul "Hubungan Bilateral Indonesia Amerika Serikat, Suatu Tinjauan Ekonomi - Politik Periode 1980 - 1990, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari hubungan bilateral Indonesia - Amerika, dan menggambarkan bagaimana hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan politik serta memberikan gambaran bagaimana prospek dan masalahnya.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud di atas maka penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian kepustakaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan dasar analisa, baik dalam rangka penyusunan konseptual maupun operasional penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang akurat, maka penulis memakai teknik pengumpulan data berupa telaah dokumen. Dalam analisa data penulis memakai analisa bantu berupa pendekatan ekonomi dan politik. Sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif. Dan selain telaah dokumen juga dilakukan pengamatan secara tidak langsung melalui media massa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya saling membutuhkan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

merupakan dasar dari terjalinnya hubungan kedua negara. Indonesia memerlukan hubungan dengan Amerika Serikat dalam upaya untuk mendapatkan modal dan investtasi untuk pembiayaan pembangunan, teknologi dalam menggerakkan industri dalam negeri dan kualitas sumber daya manusia, tempat pemasaran produk-produk ekspor, dan sebagai strabilisator di kawasan Asia Tenggara. Dan sebaliknya Amerika Serikat membutuhkan Indonesia sebagai negara tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk industri, menanamkan investasi, pemasaran hasil-hasil insdustri, dan untuk kepentingan politik, pertahanan dan keamanan karena peran politik dan letak strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

Dalam bidang ekonomi menunjukkan bahwa pola hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah dalam bidang perdagangan dan investasi serta bantuan modal. Di bidang perdagangan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat selama satu dasawarsa 1980 - 1990 berfluktuasi dan selalu memberikan surplus bagi Indonesia dan sebaliknya Amerika serikat selalu mengalami defisit. hal ini terlihat dari neraca perdagangan kedua negara dimana dalam sepuluh tahun hubungan perdagangan tersebut, setiap tahun Indonesia memperoleh surplus sebesar 1,3 hingga 3,5

milyar dollar AS. Sebaliknya defisit bagi Amerika Serikat berkisar 1,5 hingga 3,5 milyar dollar AS. Di bidang investasi Amerika Serikat selama tahun 1980an telah memberikan bantuan pembangunan dan investasi kepada Indonesia yang setiap tahunnya rata-rata sekitar 100 juta dollar AS, dalam bentuk bantuan teknik, pangan, proyek dan berbagai hibah.

Dalam bidang politik hubungan antara kedua negara adalah dalam rangka mencapai saling pengertian dan pendekatan melalui kunjungan antara para pejabat kedua negara, seperti kunjungan Presiden Reagan ke Bali pada tahun 1986 dan kunjungan Presiden Soeharto ke Amerika Serikat yang menghasilkan saling pengertian dan pemecahan berbagai masalah politik dan ekonomi antara kedua negara, Perjuangan Indonesia dalam konvensi Hukum Laut dan menyayangkan sikap Amerika Serikat yang menolak konvensi tersebut, Perbedaan pandangan mengenai hak asasi manusia di Timor-Timur, masalah hak cipta dan berbagai hubungan politik lainnya.

Seperti lazimnya dalam hubungan antar negara, maka hubungan antara Indonesia- Amerika Serikat juga mengalami beberapa kendala. Seperti menghangatnya kritikan mengenai pelaksanaan hak asasi manusia di Timor-Timur oleh sejumlah kalangan dan pers di Amerika Serikat pada tahun

1980-an, sikap Amerika Serikat yang menolak konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia yang sangat mendukung konvensi tersebut sebagai salah satu forum dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Masalah Intellectual Property Rights, masalah proteksionisme, kuota, undang-undang yang menjamin investasi di Indonesia dan kendala dalam promosi ekspor Indonesia dan Amerika Serikat.

Meskipun terdapat kendala-kendala dalam hubungan kedua negara, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa prospek hubungan kedua negara, khususnya dalam hubungan ekonomi dan politik cukup baik seiring dengan perkembangan ekonomi kedua negara dan komitmen kedua negara untuk mencapai saling pengertian yang merupakan salah satu syarat fundamental dalam mencapai hubungan yang harmonis.

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - AMERIKA SERIKAT	14
A. Faktor-Faktor Yang Mendasari Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat... ..	14
1. Faktor Geostrategi dan Geopolitik.	15
2. Faktor Historis/Sejarah	18
3. Faktor Ekonomi	20
3. Faktor Sosial Budaya	22
B. Politik Luar Negeri Indonesia dan Amerika Serikat	23
1. Politik Luar Negeri Indonesia	23
2. Politik Luar Negeri Amerika Serikat	30

		C. Pendekatan Ekonomi Politik Dalam Hubungan Internasional	36
BAB	III	HUBUNGAN EKONOMI-POLITIK INDONESIA - AMERIKA SERIKAT	41
		A. Hubungan dan Kerjasama Ekonomi	41
		1. Hubungan Perdagangan	42
		2. Investasi Dan Bantuan Modal	56
		B. Hubungan Dan Kerjasama Politik	61
BAB	IV	ANALISIS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AMERIKA SERIKAT SUATU TINJAUAN EKONOMI POLITIK	67
		A. Hubungan Ekonomi dan Politik antara Indonesia - Amerika Serikat	69
		B. Kendala Ekonomi - Politik Hubungan Indonesia - Amerika Serikat	88
		C. Prospek Kerjasama Ekonomi - Politik Indonesia - Amerika Serikat	104
BAB	V	KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN	108
		1. Kesimpulan	108
		2. Saran-Saran	110
		Daftar Kutipan	112
		Daftar Pustaka	115

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
1. Neraca Perdagangan Indonesia - Amerika Serikat Tahun 1980 - 1990 (US\$ Juta)	46
2. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat Menurut Jenis Komoditi Utama	48
3. Jenis-Jenis Komoditi Yang Diekspor Ke Amerika Serikat Tahun 1986 - 1987	51
4. Neraca Perdagangan Amerika Serikat - Indonesia Tahun 1980 - 1990	53
5. Pledge Bantuan Amerika Serikat (Proyek dan Nilai Investasi)	58



BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki keterbatasan dan kemampuan dalam negeri, baik itu keterbatasan dan kemampuan sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu maka satu negara perlu mengadakan hubungan dengan negara lain yang diharapkan dapat membantu mengembangkan potensi dalam negeri dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri suatu negara.

Kerjasama antar negara merupakan perwujudan dari pergaulan masyarakat internasional yang selalu mengadakan hubungan-hubungan yang bersifat kontinyu dan tetap. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam di bumi ini serta penguasaan teknologi yang dimiliki tidak merata, sehingga anggota-anggota masyarakat internasional saling tergantung satu sama lain. 1)

Hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat telah berlangsung sejak lama. Sebenarnya hubungan tersebut sudah dimulai sejak tahun 1600-an, ketika pada waktu itu orang-orang Amerika tiba di Hindia Timur yang merupakan awal dari pengembangan hubungan lebih lanjut. Dan pada tahun 1784 sebuah kapal berbendera Amerika

Serikat tiba di Batavia. Dengan tibanya kapal Amerika tersebut di Batavia, maka pemerintah Amerika Serikat kemudian menjajaki untuk mengirimkan konsulnya untuk bertugas di Indonesia, meskipun aktivitasnya belum begitu resmi. Akhirnya pada tahun 1801 konsul Amerika Serikat yang pertama tiba di Batavia, sebagai tindak lanjut dalam hubungan kedua negara. Dan sejak itu pula sampai sekarang Indonesia dan Amerika Serikat tetap mengadakan hubungan bilateral dengan baik.²⁾

Sejak kepemimpinan Orde Baru di tahun 1966, hubungan antara kedua negara telah berkembang ke arah yang lebih baik. Dan sejak itu pula Pembangunan Nasional Indonesia diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional secara menyeluruh. Kemudian untuk menyokong hal ini Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya memerlukan bantuan dari negara besar seperti Amerika Serikat, karena Amerika Serikat memiliki potensi besar dalam sumber dana, investasi, serta teknologi.

Di lain pihak, sejalan dengan kebijaksanaan dan potensi yang dimiliki Indonesia, Amerika Serikat dapat memanfaatkan hubungannya dengan Indonesia dalam mendapatkan bahan-bahan mentah, kesempatan menanam modal, serta pemasaran hasil industrinya. Secara politis Indonesia yang stabil dan perekonomiannya berkembang pada

gilirannya diharapkan dapat membantu terciptanya stabilitas regional. Jadi secara keseluruhan hubungan antara kedua negara didasarkan atas kepentingan kedua negara dalam bidang ekonomi, politik, dan faktor-faktor historis, geografis dan strategis.

Saling pengertian dan persamaan kepentingan tersebut di atas memungkinkan Indonesia yang merupakan negara berkembang dapat berhubungan erat dengan Amerika Serikat yang merupakan negara industri maju. Dan sebagai negara yang sedang giat-giatnya membangun dan dengan kemampuan yang terbatas, Indonesia memandang Amerika Serikat sebagai negara yang dapat berperan sebagai partner yang juga menyadari dan mengharapkan agar Amerika Serikat memainkan peranan penting dalam memelihara perdamaian dan stabilitas regional, yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh pada kelangsungan pembangunan Indonesia.

Diantara kedua negara juga terdapat kondisi dan faktor obyektif yang bersifat komplementer yang dapat dikembangkan demi kepentingan bersama. Dan meskipun kedua negara menganut sistem dan wawasan politik, pandangan dan pendekatan-pendekatan yang berbeda terhadap masalah dunia, namun masih terbuka kesempatan yang luas bagi penggaalangan kepentingan bersama.

Indonesia dengan tepat menyadari bahwa ketahanan

nasional adalah penyangga bagi keamanan nasional dan hubungan internasional. Dan perkembangan ekonomi akhirnya merupakan kunci bagi ketahanan nasional. Maka hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah lebih dari sekedar urusan ekonomi. Karena berkaitan pula dengan masalah politik. Karena baiknya hubungan ekonomi kadangkala tergantung dari membaiknya hubungan politik.

Disamping itu salah satu hal yang paling mendasar dalam terjalinnya hubungan antara orang-orang Indonesia dengan orang-orang Amerika Serikat di berbagai forum/tingkat, seperti adanya misi kesenian Indonesia ke Amerika Serikat, pertukaran pelajar, mahasiswa, dosen dan berbagai karyawan baik dari instansi pemerintah dan swasta antara kedua negara, yang merupakan wujud nyata dari adanya keinginan kedua negara dalam mejalin hubungan yang erat.

Sejauh ini meskipun belum sepenuhnya mencapai apa yang dicita-citakan bersama, hubungan Indonesia Amerika Serika telah berjalan sesuai dengan kondisi obyektif kedua negara. Masing-masing pihak berkeinginan dan berusaha untuk terus mengembangkannya, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, tekonologi, dan bidang-bidang lainnya.

Dalam melaksanakan program pembangunan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan oleh Indonesia di dalam negeri dapat dimengerti oleh Amerika Seikat,

sedangkan kebijaksanaan luar negeri, Indonesia dianggap cukup moderat dan konstruktif. Hal ini yang merupakan landasan yang mendorong Amerika Serikat untuk memelihara sikap bersahabat dengan Indonesia dan menjadi dasar untuk mengembangkan kerja-sama yang saling menguntungkan antara kedua negara. Indonesia dapat menarik pengalaman dan mengambil manfaat dari hubungannya dengan Amerika Serikat, seperti halnya Amerika Serikat ingin belajar dan mengambil manfaat dari Indonesia. Atas dasar itulah hubungan antara negara terus berkembang.

B. Rumusan Masalah

Untuk mewujudkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat kearah yang lebih baik tidak sedikit kendala-kendala yang dapat timbul dari hubungan tersebut. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sistem politik, sistem perekonomian, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan politik kedua negara serta kepentingan nasional masing-masing.

Seperti halnya yang terjadi dalam hubungan antara bangsa, hubungan Indonesia - Amerika Serikat diwarnai pula oleh pasang surut dan pandangan-pandangan serta sikap yang berbeda terhadap sejumlah masalah internasional seperti Afganistan, Kamboja, Pasific basin community dan sebagainya, dimana sikap dan pandangan Indonesia banyak persamaan dengan Amerika Serikat. Akan tetapi dalam

berbagai masalah lainnya seperti Afrika Selatan, Timur Tengah, Perlucutan Senjata, Zopfan dan lain sebagainya, terjadi perbedaan pandangan dan sikap. Dalam hubungan bilateral terdapat beberapa masalah yang mengganjal hubungan kedua negara, seperti masalah-masalah dan hambatan dalam perdagangan serta berbagai kebijaksanaan ekonomi, seperti Masalah proteksinisme, hambatan tarif dan non-tarif, hambatan investasi, masalah Intellectual Property Rights, perizinan impor, dan masalah bantuan Amerika Serikat untuk pembangunan Indonesia yang sering dikaitkan dengan masalah pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.

Masalah-masalah tersebut di atas meskipun tidak sampai memutuskan hubungan kedua negara yang telah terjalin cukup lama, tetapi masalah dan kendala-kendala tersebut dapat menimbulkan pasang surut hubungan kedua negara dan dapat pula mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi dan politik masing-masing. Maka berdasarkan rumusan masalah tersebut dan untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat bidang ekonomi dan politik dengan menggunakan tinjauan ekonomi-politik selama satu dasawarsa antara tahun 1980 hingga tahun 1990, maka timbul pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan bilateral antara Indonesia - Amerika?

Serikat dalam bidang ekonomi dan politik ?

2. Kendala - Kendala apakah yang mewarnai hubungan ekonomi dan politik antara kedua negara ?
3. Bagaimana prospek dan masalahnya, hubungan bilateral antara Indonesia - Amerika Serikat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sekaligus memberi gambaran mengenai faktor-faktor yang mendasari hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat, bagaimana hubungan bilateral tersebut ditinjau dari sudut ekonomi - politik, serta bagaimana prospek dan masalah dari hubungan bilateral tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat berguna bagi penulis khususnya dalam mengamati atau menelaah permasalahan-permasalahan yang timbul sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mencari atau menemukan alternatif pemecahannya.
- b. Sebagai bahan masukan atau referensi bagi pengembangan masalah-masalah internasional pada khususnya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

- c. Dapat juga dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya menyangkut kebijaksanaan hubungan Indonesia - Amerika Serikat dan pelaksanaan politik luar negeri.

D. Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian ini, maka digunakan berbagai teori yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan sebagai titik tolak pembahasan dan sekaligus dijadikan kerangka berpikir penulis dalam upaya menyusun penelitian ini.

Mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat, maka menurut DR. Budiono Kusumohamidjoyo;

" yang dimaksud hubungan bilateral adalah suatu bentuk hubungan antara dua negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran untuk mencapai atau menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur produktivitas ekonomi",³⁾

Di dalam dunia modern ini hubungan antar bangsa sudah tersebar di seluruh pelosok dunia ini. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang dapat membebaskan diri dari ketergantungan dan keterlibatannya dengan bangsa dan negara lain, karena semua bangsa merupakan warga dunia.⁴⁾ Hubungan tersebut dimaksudkan untuk saling kerjasama dalam rangka mencapai tujuan nasional masing-masing. Karena suatu negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan nasional masing-masing. Karena suatu negara tidak dapat

memenuhi semua kebutuhan dalam negerinya sehingga membutuhkan bantuan negara lain, begitu pula sebaliknya.

Perkembangan hubungan internasional dewasa ini semakin memperlihatkan kaitan yang kuat antara masalah ekonomi dan politik. Spero mengatakan bahwa :

" ekonomi dan politik terdapat interdependensi. Saling ketergantungan keduanya juga terdapat dalam hubungan internasional. Sumber daya ekonomi dapat menentukan strategi dan kekuasaan diplomatik, GNP, jumlah dan kualitas sumber daya, perdagangan internasional dan posisi keuangan suatu negara menentukan kekuatan militernya. Sebagai contoh dapat dilihat dalam pengaruh politik dan militer Amerika Serikat di dunia ini karena kekuatan ekonomi yang dimilikinya ". 5)

Kemudian oleh Prof. DR. Juwono Sudarsono mengatakan bahwa :

" ekonomi politik (political-economy) pada dasarnya ekonomi suatu kerangka pemikiran yang berusaha untuk memajukan kesejahteraan negara, dimana politik tidak dapat dipisahkan dari ekonomi, saling tergantung satu sama lain ". 6)

Dengan demikian ekonomi suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan politik yang dialaminya. Keduanya saling mempengaruhi, dimana hubungan antara ekonomi dan politik paling tidak pada zaman sekarang adalah bersifat timbal balik.

Dalam hubungan antar bangsa baik itu hubungan bilaeral maupun multilateral maupun ekonomi dan politik saling terkait, dimana hubungan ekonomi sering dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor politik atau hubungan ekonomi

kadang menimbulkan akibat politik.

Dalam upaya mewujudkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat khususnya di bidang ekonomi dan politik maka secara keseluruhan Amerika Serikat sangat menghargai hubungannya dengan Indonesia. Hal ini berakar pada beberapa faktor pendukung termasuk luas dan arti strategis Indonesia, pengaruhnya yang konstruktif. dalam masalah-masalah regional dan internasional, hubungan dagang, penanaman modal, timbal balik yang cukup besar, dan banyak ikatan pribadi yang telah berkembang di antara kedua negara.

Di samping faktor mendasar dalam terciptanya hubungan kedua negara adalah faktor letak strategis Indonesia, sumber alam dan potensi ekonomi, ikatan historis Amerika Serikat di Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, serta kekayaan budaya Indonesia. Amerika Serikat dianggap penting bagi Indonesia sebagai negara yang mempunyai modal, teknologi, dan potensi ekonominya yang besar sangat penting untuk pembangunan Indonesia.

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi khususnya serta hubungan politik mempunyai landasan yang kuat akan kecintaan kedua negara akan kemerdekaan. karena itu kedua negara memberikan nilai yang tinggi pada kemerdekaan, karena kemerdekaan akan memberikan pengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik.



Sebagaimana dengan negara-negara lainnya, dalam menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, Indonesia senantiasa berpegang teguh pada kebijaksanaan politik luar negerinya, yang didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan petunjuk-petunjuk GBHN. Atas ketiga dasar itu maka sifat politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia selalu mempunyai ciri yang khas yaitu bebas dan aktif, anti kolonialisme, mengabdikan pada kepentingan nasional terutama untuk pembangunan. Cita-cita politik dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang terkandung dalam declaration of independence, bahkan telah memberi pengaruh terhadap corak dan pola berpikir pemimpin-pemimpin Indonesia ketika mempersiapkan penyusunan undang-undang dasar dan falsafah negara Indonesia yang mengutamakan kemanusiaan yang beradab, kemerdekaan, dan demokrasi. Dengan adanya kesamaan itu maka tidak mengherankan apabila hubungan Indonesia - Amerika Serikat telah berlangsung cukup lama. Dalam dunia modern, sebuah unsur penting dan pokok dalam hubungan bilateral adalah komitmen timbal balik pada pembangunan ekonomi. Hubungan ekonomi dan perdagangan luar negeri perlu ditinjau dan dikembangkan guna mendukung tercapainya suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, dengan berusaha meningkatkan sektor perdagangan luar negeri, sebab dengan makin berkembangannya perdagangan makin besar pula pengaruhnya terhadap perekonomian-

an, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui usaha peningkatan volume maupun nilai perdagangan luar negeri. Dan dalam mencapai hubungan ekonomi yang lebih baik juga sangat tergantung pada kebijaksanaan ekonomi dan politik setiap negara, dimana kadangkala suatu hubungan bilateral maupun multilateral dalam bidang ekonomi selalu terkait dengan situasi politik baik domestik maupun internasional.

Melihat perkembangan hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat cukup baik. Pengembangan hubungan baik tersebut perlu bagi kepentingan nasional kedua negara. Masalah-masalah yang selama ini mengganggu hubungan kedua negara telah dapat diatasi secara bertahap seiring dengan perkembangan dalam negeri Indonesia dan Amerika Serikat dan perkembangan internasional.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis beranjak dari dasar pemikiran logika yaitu induktif, dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif.

1. Teknik Pengumpulan data

Untuk menunjang kesempurnaan dan validitas penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan riset pada perpustakaan-perpustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian skripsi ini, seperti mengunjungi perpustakaan American Cultural Centre, Badan

Penelitian dan pengembangan Departemen Luar Negeri (Litbang Deplu) Center for Strategic and International Studies (CSIS), dan perpustakaan FSIP Universitas Indonesia. Begitupun, dilakukan pengamatan secara tidak langsung melalui media massa baik visual maupun audio visual serta media cetak lainnya.

2. Teknik Analisa data

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini, penulis menerapkan pendekatan atau metode dalam menganalisa masalah yang telah dirumuskan dengan menggunakan metode kualitatif. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan jika dapat mengembangkan juga pendekatan kualitas dalam melihat permasalahan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUBUNGAN BILATERAL
INDONESIA - AMERIKA SERIKAT

A. Faktor - Faktor Yang Mendasari Hubungan Bilateral Indonesia - Amerika Serikat.

Dalam meminjau hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat perlu dipahami beberapa hal mengenai faktor-faktor atau kepentingan-kepentingan pokok yang mendasari hubungan kedua negara dengan maksud agar dapat memberikan kejelasan mengenai kepentingan-kepentingan yang mengikat kedua negara. Semakin meningkatnya intensitas hubungan kedua negara sejak tahun 1966, awal dimulainya orde baru hingga sekarang ini menandai pentingnya Amerika Serikat bagi Indonesia.

Menurut Paul Wolvowitz, mantan duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, bahwa ada tiga alasan fundamental untuk melihat bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat terbentuk dan intensitasnya makin baik hingga sekarang, yaitu :

1. Keduanya adalah negara di kawasan Pasifik dan sama-sama berkepentingan untuk menjaga agar Asia Tenggara tidak didominasi oleh kekuatan asing. Kepentingan ini membutuhkan Indonesia yang kuat,

bebas, dan stabil. karena itu kedua negara mempunyai kepentingan strategis yang sama.

2. Hubungan ekonomi kedua negara sudah makin baik dan nantinya diharapkan akan menjadi erat dengan berkembangnya ekonomi Indonesia. Keberhasilan pengembangan ekonomi Indonesia akan menyebabkan lebih banyak produk bermutu tinggi dapat dijangkau oleh konsumen Amerika, dan juga akan menyediakan pasaran yang lebih luas untuk ekspor dari Amerika. Karena itu kedua negara mempunyai kepentingan bersama dalam pengembangan ekonomi dalam sistem perdagangan yang terbuka.
3. Sekalipun ada perbedaan-perbedaan kedua negara mempunyai persamaan-persamaan. Keramah tamahan yang sering dijumpai baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat tak syak lagi dalam memainkan peranan dalam persahabatan antara kedua negara. ?)

Jadi terdapat beberapa faktor yang mendasari hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat, diantaranya :

1. Faktor Geostrategi dan Geopolitik

Faktor geostrategi dan geopolitik merupakan salah satu faktor dalam terjalinnya hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Faktor geostrategi adalah salah satu faktor yang ditinjau berdasarkan letak

geografis/wilayah suatu negara dan menimbulkan suatu pertimbangan-pertimbangan atau strategi berdasarkan situasi dan kondisi obyektif wilayah tersebut. Sedangkan faktor geopolitik adalah menyangkut kepentingan politik atau kebijaksanaan politik yang diambil berdasarkan kondisi atau kebijaksanaan politik yang diambil berdasarkan kondisi obyektif dari letak geografis suatu negara.

Ditinjau dari sudut geografis Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang masing-masing terpisah jauh. Namun Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang terletak di kawasan Pasifik. Letak Indonesia yang terletak dan berada dalam posisi silang samudra Pasifik dan Samudra Hindia merupakan persimpangan jalan laut dan udara yang sangat penting bagi Amerika Serikat. Karena pentingnya letak Indonesia ini berdasarkan strategi dan pandangan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat senantiasa berusaha untuk tidak memberikan peluang bagi rivalitasnya Uni Soviet untuk menguasai perairan Indonesia, terutama pada saat saat mengahangatnya perang dingin. Alur Laut Cina Selatan serta perairan Indonesia di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, Alor/Wetar mempunyai arti strategis bagi Amerika Serikat. Alur ini penting dalam rangka pemindahan armada Pasifik ke samudra Hindia dikala terjadi peningkatan wilayah kritis di Timur

Tengah dan Afrika yang dapat mengancam kedudukan sekutu Amerika Serikat di Eropa.

Menurut Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Paul Wolvowitz ketika masih menjabat sebagai asisten menteri luar negeri Amerika Serikat untuk urusan Timur Jauh dan Pasifik dari kesimpulan pendapatnya dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang memainkan peranan kepemimpinan di Asia Tenggara maupun di kawasan Pasifik Basin, dimana arti penting geostrategis Indonesia tidak dapat diabaikan oleh Amerika Serikat. ^{e)}

Indonesia adalah negara besar di kawasan Asia Tenggara dan sebagai negara yang anti komunis, dapat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dalam strategi globalnya untuk membendung melebarnya pengaruh komunis di dunia khususnya di kawasan Asia Tenggara. Politik luar negeri Amerika Serikat dan politik pertahannya selama perang dingin dikenal dengan nama doktrin Truman. ^{e)} Politik pembendungan komunis ini pada awalnya mencegah terus meluasnya komunisme Uni Soviet ke wilayah Eropa, Yunani, Turki, dan ini tidak berarti tidak berlaku bagi kawasan Asia Tenggara.

Dengan mengadakan hubungan dengan Amerika Serikat, Indonesia megharapkan Amerika Serikat dapat menciptakan

stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Sebab tanpa adanya stabilitas dan penyeimbang kekuatan di kawasan ini, maka harapan untuk terciptanya stabilitas di kawasan Asia Tenggara kemungkinan tidak akan terwujud. Indonesia sebagai negara non-komunis di Asia Tenggara tentunya sangat memerlukan kehadiran negara besar dalam hal ini, Amerika Serikat untuk membendung meluasnya pengaruh komunis di Asia Tenggara. Dari pertimbangan-pertimbangan dan kenyataan itulah, maka kedua negara saling membutuhkan satu sama lain dan memandang perlu mengadakan hubungan lebih lanjut.

2. Faktor Historis/Sejarah

Salah satu faktor yang mendasari hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat adalah faktor historis/sejarah. Sejak dahulu Amerika Serikat memandang kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang potensial dan strategis. Ini berarti Amerika Serikat telah mempunyai ikatan historis terhadap kawasan ini dan memandang perlu untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara yang ada di kawasan ini, termasuk dengan Indonesia.

Hubungan dan terjalinnya kontak antara orang-orang Amerika dan orang-orang Indonesia sudah ada sejak tahun 1600-an ketika orang-orang Yankee dari pelabuhan Atlantik terlibat dalam perampokan. Salah seorang dari mereka adalah Yoseph Baraddock dari Massachusetts, yang menyita

kapal Inggeris yaitu kapal "Adventure" dan meninggalkan nakhodanya di pulau Hindia Timur. Dan sejak itu pula mereka mulai mengenal salah satu pulau di Indonesia yaitu pulau Sumatera sekaligus mulai mengenal orang-orang di pulau itu. sesudah perang revolusioner kapal-kapal Amerika terlibat dalam perdagangan yang giat dengan Hindia Timur. Di tahun 1802 misalnya, 30 kapal dagang Amerika mengunjungi Sumatera. 10)

Dengan kenyataan tersebut di atas, maka hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat sudah terjadi beberapa abad yang lalu, meskipun hubungan tersebut belum resmi, dalam arti baru dalam tarap perkenalan. Dari kenyataan itulah maka secara tak langsung sudah terjadi ikatan pribadi dan perkenalan antara kedua bangsa yang merupakan benih dalam menjalin hubungan dan kerjasama antara kedua negara lebih lanjut.

Pada zaman penjajahan Belanda dan perjuangan pergerakan Indonesia dalam merebut kemerdekaan, Amerika Serikat cukup memberi peran yang berarti. Amerika Serikat telah memainkan peranan yang penting dan aktif melalui panitia jasa-jasa menengahi pertikaian antara Indonesia dengan Belanda. Dan Amerika Serikat juga telah memainkan peranan yang sangat berarti dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut kembali Irian Barat dan sebagai salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan

Indonesia.

Di sisi lain, pemimpin-pemimpin Indonesia yang sebagian besar mendapat pendidikan barat merasa benar-benar menghayati gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang diterapkan oleh para sarjana dan negarawan Amerika Serikat. Mereka mempelajari, mengerti dan bahkan mengagumi idialisme dibalik Revolusi Amerika dan falsafah yang mendasari "Deklarasi Kemerdekaan" Amerika. Tujuan-tujuan yang terkandung di dalam Deklarasi kemerdekaan Amerika tersebut telah banyak sekali memberi pengaruh terhadap pola dan corak dalam berpikir para pemimpin Indonesia ketika mempersiapkan penyusunan undang-undang dasar dan falsafah negara Indonesia, yang mengutamakan pada kemanusiaan yang beradab, kemerdekaan, dan demokrasi. Dan hal itulah yang menjadi salah satu dasar dalam menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. ¹¹⁾

3. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang mendasari dan memegang peranan penting dalam hubungan antar bangsa adalah hubungan ekonomi. Hubungan antar bangsa yang didasarkan atas kepentingan ekonomi dimaksudkan untuk menunjukkan perekonomian dan kesejahteraan setiap negara, sebagai salah satu dari kepentingan nasional yang harus diperjuangkan.

Meninjau faktor ekonomi sebagai salah satu faktor yang mendasari hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat tidak terlepas dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sejak dahulu Indonesia sudah terkenal sebagai yang kaya akan sumber daya alam. Hal inilah yang sejak dahulu menjadi incaran negara-negara Eropa dan Negara yang membutuhkan sumber alam baik itu untuk kepentingan industri maupun perdagangan. Dan Amerika Serikat sebagai negara industri yang besar tentunya membutuhkan sumber daya alam yang cukup besar pula dalam menopang kelangsungan industrinya. Disamping itu pula Amerika Serikat juga memerlukan tempat pemasaran hasil industrinya ke negara yang memiliki potensi pasar dan memerlukan hasil-hasil industri untuk pembangunan negaranya seperti Indonesia. Dengan dasar itulah maka kedua negara sepakat dan memandang perlu untuk menjalin hubungan satu sama lain. Indonesia mempunyai kepentingan terhadap Amerika Serikat dalam usaha pembangunan nasionalnya, karena Amerika Serikat mempunyai potensi besar dalam teknologi, modal, dan daya beli masyarakatnya yang tinggi dan mempunyai potensi pasar yang besar bagi pemasaran produk - produk dari Indonesia. Dan hal itulah salah satu faktor dalam terjalinnya hubungan kedua negara.

Sebaliknya hubungan ekonomi kedua negara benihnya sudah sejak dahulu ketika kapal-kapal dagang Amerika

mengunjungi Sumatera. saat itulah mereka mulai mengenal akan potensi Indonesia sebagai negara penghasil rempah-rempah. Dan hingga sekarang hubungan tersebut semakin ditingkatkan seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi kedua negara.

4. Faktor Sosial dan Budaya

Dalam hubungan antar bangsa, hubungan sosial budaya merupakan alat penting untuk memupuk persahabatan dan saling pengertian. Kontak-kontak langsung dan pertukaran kunjungan baik dalam tingkat resmi maupun tidak resmi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan saling pengertian yang lebih baik. 12)

Indonesia sebagai negara yang mempunyai beraneka ragam budaya, adat-istiadat, suku bangsa dan bahasa telah menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk mengenal dan mempelajarinya. Kekayaan budaya tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi orang-orang Amerika untuk mengenal dan asset bagi bangsa Indonesia. Dan Orang-orang Amerika terkenal sebagai orang yang memberi penghargaan yang tinggi akan seni dan budaya yang ada di seluruh pelosok dunia, termasuk kekayaan seni dan budaya Indonesia.

Amerika Serikat juga terdiri dari beberapa suku bangsa dan agama sehingga Indonesia dan Amerika Serikat dapat saling tukar pengalaman dan saling belajar mengenai keadaan sosial dan budaya masing-masing. bahkan semboyan

nasional Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika", mirip sekali dengan semboyan Amerika "E Pluribus Unum". Dan kebhinnekaan ini sama sama diterima baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

Meningkatnya hubungan antara kedua negara khususnya dalam bidang sosial dan budaya dapat dilihat dari semakin banyaknya orang-orang Indonesia yang belajar dan mengunjungi Amerika Serikat, demikian pula sebaliknya semakin antusiasnya orang-orang Amerika ingin mengenal lebih dekat dan mempelajari budaya yang ada di Indonesia, yang merupakan wujud dari adanya kepentingan kedua negara dalam bidang sosial dan budaya. Adanya kontak, dialog dan pendekatan terhadap cara berfikir dan cara hidup satu sama lain akan dapat meningkatkan saling pengertian yang lebih baik lagi dan akan dapat membantu masing-masing negara menghindarkan diri dari mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan pihak lainnya. Hal inilah sebagai wujud dari peran kebudayaan dalam menjembatani hubungan dan saling pengertian antar negara.

B. Politik Luar Negeri Indonesia dan Amerika Serikat

1. Politik Luar Negeri Indonesia

Sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahwa betapapun besar dan jayanya suatu negara, ia tetap tidak terlepas dari negara lainnya. Dalam rangka menjalin

hubungan tersebut, perlu dijalankan kebijaksanaan tersendiri yang dapat mengatur kerjasama dengan baik, yang dinamakan politik luar negeri. Politik yang dijalankan suatu negara akan berbeda dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang negara tersebut, baik perbedaan geografis, budaya maupun kepentingan nasional masing-masing. Ringkasnya politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor obyektif dan subyektif dalam mencapai tujuannya.

Politik Luar Negeri suatu negara adalah bagian dari politik nasional. Dan oleh sebab itu mempunyai landasan dan tujuan-tujuan yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan dan tujuan-tujuan politik nasional Indonesia adalah juga landasan dan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. Karena politik nasional Indonesia adalah seluruh kegiatan dan proses dari segala struktur dan fungsi negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan negara sesuai negeri Indonesia dan mengetahui garis-garis besar haluannya kita harus bertolak dari landasan dan tujuan-tujuannya.

Seperti politik nasional Indonesia, politik luar negeri Indonesia mempunyai landasan idiil dan landasan konstitusional. Landasan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 ditetapkan sebagai dasar

falsafah negara Republik Indonesia. Sedang yang menjadi landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945 dan pembukaannya serta ketetapan-ketetapan MPR, khususnya ketetapan MPR No. IV/MPR/78 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kedua landasan tersebut saling terkait satu sama lain. Pembukaan UUD 1945 menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan pasal-pasalnyanya merupakan penguatan atau pelaksanaan Pancasila. Pada gilirannya Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam menyusun strategi politik luar negeri Indonesia dan melaksanakannya kita harus selalu berpegang pada keduanya.

Tujuan politik luar negeri Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara kita seperti yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian tugas utama politik luar negeri Indonesia adalah mengabdikan kepada kepentingan nasional, tetapi kepentingan nasional itu harus diartikan secara luas, sehingga tidak hanya meliputi keamanan nasional dan kesejahteraan umum di Indonesia, melainkan juga Tata Dunia Baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesuai dengan itu maka politik luar negeri Indonesia harus bersifat bebas aktif dan anti penjajahan. Dengan demikian politik luar negeri Indonesia tidak dapat menerima keterikatan dengan blok-blok ideologis yang bermusuhan,

dengan pakta-pakta militer yang saling berhadapan, dengan pengelompokan-pengelompokan lain berdasar ras atau agama. Sebaliknya Indonesia menyambut baik tiap kerjasama baik bilateral, maupun multilateral yang berdasarkan perdamaian, kemanusiaan, saling menghormati demi tercapainya kesejahteraan umat manusia.

Politik luar negeri yang bebas dan aktif dilaksanakan secara konsekwen dan diabadikan untuk kepentingan nasional terutama untuk kepentingan pembangunan nasional di segala bidang dan berbagai forum, baik bilateral, regional, maupun internasional, seperti Perserikatan bangsa-Bangsa, Asean, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam, dan sebagainya. dalam rangka mewujudkan Tatanan Dunia Baru, perlu terus ditingkatkan dalam usaha untuk menggalang dan memupuk solidaritas dan kesatuan sikap serta kerjasama antara negara-negara berkembang, guna meningkatkan kemandirian bersama negara-negara tersebut. Khusus di wilayah Asia Tenggara, kerjasama diantara negara-negara di Asia Tenggara dan Asean perlu terus ditingkatkan dan diperluas dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional anggota-anggotanya menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang aman, bebas, netral, dan sejahtera. 13)

Dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tersebut, Indonesia menempatkan posisinya sebagai subyek dalam hubungan luar negerinya dan tidak sebagai

obyek, sehingga Indonesia tidak dapat dikedalikan oleh haluan politik negara lainnya yang berdasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional negara lain itu sendiri.

Pernyataan Pemerintah tanggal 2 September 1984 dan penjelasan Bung Hatta itu mengungkapkan dalil-dalil dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai asa Non-Blok dalam politik luar negeri, suatu asas yang kini merupakan dasar bersama bagi kebanyakan negara Asia, Afrika, dan Amerika latin dalam politik luar negeri Indonesia sampai sekarang karena erat berkaitan dengan tujuan nasional "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 14)

Telah diketahui bahwa politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan keluar negeri dan merupakan bagian dari keseluruhan kebijaksanaan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi-kondisi dalam negeri. dan secara pragmatis sasaran kepentingan nasional Indonesia dapat dikemukakan 4 (empat) macam kategori, yaitu :

Dalam kategori pertama, dibedakan antara sasaran yang spesifik (misalnya penyelesaian friksi perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini) dan sasaran yang umum (misalnya penegasan sikap Indonesia terhadap gagasan masyarakat kawasan Pasifik).

Dalam kaetegori kedua, sasaran kepentingan Indonesia

di bedakan menurut sifat keduanya yaitu :

Dalam kategori kedua, sasaran kepentingan Indonesia dibedakan menurut sifatnya, yaitu :

- a. Idiologis ; sikap anti komunisme maupun liberalisme.
- b. Politik ; Wawasan Nusantara, Asean, Politik Bebas Aktif.
- c. Militer ; Anti aliansi, dwi fungsi ABRI
- d. Ekonomi ; Swasembada, orientasi ekspor.
- e. Sosial Kultural ; Alih teknologi, pertukaran kebudayaan

Dalam kategori ketiga kepentingan nasional dapat dibedakan antara sasaran konstan (misalnya yang menyangkut eksistensi dan kesejahteraan nasional), dan sasaran yang dapat berubah-ubah dari hari ke hari (misalnya penetapan kuota impor dan tarif ekspor).

Sedangkan kategori keempat sasaran kepentingan nasional dibedakan menurut jangka waktunya :

- a. Sasaran jangka Pendek ; meliputi persoalan yang harus diatasi dengan segera seperti masalah Timor-Timur.
- b. Sasaran Jangka Menengah ; mencakup volume masalah yang besar dan beraneka ragam seperti usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional melalui langkah langkah internasional, dan usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan martabat atau prestise nasional di forum internasional.
- c. Sasaran jangka Panjang ; mencerminkan cita-cita utama

dari bangsa Indonesia yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. 15)

Dengan kekuatan-kekuatan kolonial lain, Indonesia harus memperjuangkan kemerdekaan politik maupun ekonomi segala bangsa dan dalam rangka itu berjuang untuk menghapus kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk manifestasinya, termasuk dalam sistem ekonomi Internasional ciptaan jaman kolonial yang memeras negara-negara berkembang dengan mengurus sumber-sumber daya mereka dengan harga murah. Sebagai gantinya harus diperjuangkan pembentukan suatu sistem ekonomi dunia yang benar-benar suatu tata atau orde.

Melihat perkembangan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang sekarang ini mulai tampak berkembang, yaitu proses makin adanya keterbukaan dalam sistem politik yang didorong oleh munculnya teknologi dan komunikasi canggih, munculnya generasi baru, dan tumbuhnya kelas menengah dalam masyarakat Indonesia. Lingkungan internasional juga cukup memberi pengaruh pada kebijakan politik luar negeri Indonesia termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat. Indonesia juga selama ini telah berhasil menggabungkan berbagai kebudayaan dan sistem nilai melalui proses yang berjalan cukup panjang dan lama, namun berbagai penyesuaian

dapat terjadi secara gradual. Proses internasionalisasi sendiri akan berjalan dengan cepat dalam menghadapi perubahan yang cepat akan menimbulkan tantangan baru bagi Indonesia baik secara sosial maupun politis.

Dalam melihat ke depan, **masalah** utama dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia tampaknya akan terpusat pada Asean dan Asia Pasifik. Jika kerjasama antar negar-negara Asean sebagaimana diputuskan dalam KTT Manila dapat dilaksanakan dan jika kerjasama di Pasifik berkembang, maka dukungan untuk Asean akan meningkat, baik dalam organisasi sendiri, maupun di Indonesia. Dan kerjasama Ekonomi di wilayah Asia Pasifik termasuk kerjasama dengan Amerika Serikat memberikan pengaruh yang positif dalam perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang, terutama jika membawa "moderating Role" dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

2. Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Sebagaimana kita ketahui bahwa Amerika Serikat merupakan negara Adi Kuasa yang telah hadir dan berpengaruh diberbagai kawasan termasuk di kawasan Asia Tenggara, dimana Indonesia termasuk dalam kawasan tersebut. Dengan demikian Amerika Serikat mempunyai kepentingan terhadap kawasan ini yang diwujudkan dalam bentuk politik luar negerinya.

Walaupun demikian, tidak berrati bahwa segala

keinginan dan kepentingan Amerika Serikat yang ingin dicapainya semuanya dicapainya berhasil. Terbukti bahwa urusan-urusan luar negeri serta persoalan-persoalan dalam negeri sendiri, Amerika Serikat kadangkala mengalami keadaan yang pasang surut. Terutama sekali dapat kita nilai keadaan pada masa akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an.

Selama beberapa tahun tersebut Amerika Serikat mengalami kemunduran dalam urusan-urusan luar negeri serta persoalan dalam negerinya sendiri. hal ini disebabkan karena keidaktegasan politik luar negrinya. Sedangkan faktor lain yang turut menyebabkan kemunduran relatif Amerika Serikat ini dapat disebabkan misalnya oleh pengaruh resesi dunia, menurunnya pertumbuhan ekonominya, meningkatnya pengangguran dan sebagainya. Semuanya itu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jimmy Carter yang terlalu menekankan masalah-masalah hak asasi manusia, serta garis politik luar negerinya dominan bersifat moralitas.

Nantilah setelah Ronald Reagan berhasil menduduki jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat, segera menyusun rangkaian-rangkaian prioritas baru dalam bidang kebijaksanaan politik dalam dan luar negerinya. Di bawah pemerintahan Ronald Reagan politik luar negeri Amerika Serikat mempunyai tujuan fundamental, yaitu :

1. Membentuk lingkungan atau sistem internasional yang dapat memberi keuntungan bagi Amerika Serikat, atau sekurang-kurangnya sistem tersebut sama seperti yang diinginkan oleh Amerika Serikat.
2. Tujuan ini hanya dapat dicapai dalam suatu lingkungan atau sistem internasional dalam mana perubahan-perubahan yang penting terjadi dalam tata internasional, dan perubahan-perubahan itu hendaknya mengarah kepada lahirnya peradaban modern, penghindaran penggunaan kekuatan dan pemberantasan teror. 18)

dalam pandangan pemerintah Amerika Serikat, selama beberapa tahun yang lalu telah terjadi perubahan-perubahan penting dalam tata dunia internasional. dalam hubungannya dengan Uni Soviet, dan sehubungan dengan meningkatnya kemampuan militer negara tersebut, Amerika Serikat menganut suatu garis politik luar negeri yang lebih keras dan tegas terhadap Uni Soviet.

Dalam hubungan tersebut pemerintah Amerika Serikat memandang bahwa Uni Soviet akan memperluas pengaruhnya ke daerah yang makin dekat dengan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, dan Amerika Serikat merasa bahwa tugas yang dihadapinya adalah menjamin disadarinya kenyataan-kenyataan itu secara bersama-sama oleh sekutu-sekutunya serta sahabat-sahabat Amerika,

dan meneruskan usaha untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan dunia bebas. kerana pada tahun-tahun belaksngan ini terdapat ketidakpastian dikalangan masyarakat internasional mengenai apa yang merupakan kepentingan-kepentingan vital Amerika Serikat.

Kepentingan-kepentingan Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

1. Amerika Serikat harus melindungi dirinya terhadap serangan militer sebagai kepentingan utama nasionalnya.
2. Amerika Serikat harus menjamin keamanan jalurnya kesumber-sumber dan pasaran seberang lautan yang memungkinkan berlanjutnya kemakmuran perekonomian Amerika Serikat.
3. Amerika Serikat mempunyai kepentingan mendasar dalam keamanan bangsa-bangsa lain yang sepikiran dengannya, terutama sekutu-sekutu Amerika Serikat, yang pada gilirannya mereka juga dapat menyumbang kepada keamanan militer Amerika Serikat lewat persekutuan-persekutuan militer dan kepada kesejahteraan ekonomi Amerika Serikat dengan jalan menyediakan sumber-sumber dan pasaran mereka bagi semua perdagangan yang saling menguntungkan.
4. Amerika Serikat mempunyai kepentingan mendasar dalam kebebasan, kemerdekaan dan pengembangan

secara damai negara-negara yang kurang berkembang, sehingga pada saatnya mereka dapat mencapai keuntungan-keuntungan politik dan ekonomi.

5. Amerika Serikat mempunyai kepentingan mendasar dan terus menerus berusaha untuk memajukan hak-hak manusia di semua negara. 17)

Dalam rangka mengamankan pelaksanaan strateginya itu terutama untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, Amerika Serikat dapat memanfaatkan sumber daya, seperti perekonomiannya yang kuat, sekutu-sekutu yang kuat di bawah kepemimpinan yang tegas dapat menunjang politik luar negerinya, kekuatan militer yang besar, dan diplomasi.

Pada kawasan Asia Tenggara dalam situasi kawasan yang sedang berubah ditinjau dari sudut politik, ekonomi, dan militer, maka kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan ini tampaknya secara prinsip tidak berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya yaitu kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk menghadapi ancaman musuh Amerika Serikat. Dengan perkataan lain kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan ini merupakan usaha negara itu untuk mempertahankan kepentingan dunia bebas dari ancaman ofensif ideologi kemonisme terutama pada saat menghangatnya perang dingin. 18)

Ditinjau dari sudut kepentingan nasionalnya, Amerika Serikat tidak dapat membiarkan kekuatan lain menguasai

wilayah ini, karena tertanamnya modal Amerika Serikat yang tidak sedikit di nagar-negara Asia Tenggara, serta yang kaya akan bahan baku termasuk minyak, dan yang terletak sangat strategi antara dua benua dan dua samudra, yang artinya semakin meningkat dalam tahun-tahun terakhir ini. Oleh karena itu, maka Asia Tenggara merupakan wilayah yang terus diperhitungkan termasuk perhatian terhadap Indonesia. Daerah-daerah ini tetap dipandang sebagai kawasan yang cukup penting bagi Amerika Serikat, terutama dari segi militer, ekonomi, dan politik luar negeri.

Terdapat tiga kemungkinan bagi Amerika Serikat untuk memainkan peranan di Asia Tenggara. Pertama adalah menciptakan kestabilan sambil menguasai dan membawa Asia Tenggara ke dalam pengaruh Amerika Serikat. Yang kedua adalah ikut serta menstabilkan wilayah itu bersama-sama dengan bangsa-bangsa Asia Tenggara sambil mengimbangi usaha Uni Soviet yang ingin mempengaruhi daerah itu, tetapi tidak berusaha membawanya ke dalam lingkup pengaruh Amerika Serikat. Dan yang ketiga, seperti apa yang diinginkan oleh bangsa-bangsa Asean, agar Asia Tenggara menjadi wilayah aman, damai, bebas dan netral. 10)

Mengenai kebijaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat dewasa ini khususnya setelah berakhirnya perang dingin dipengaruhi oleh perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi dalam politik ekonomi internasional.

Amerika Serikat sedang berada dalam proses merumuskan kembali peran internasionalnya, dan terutama menyangkut peran di kawasan Asia Pasifik, guna menyesuaikan diri terhadap kenyataan-kenyataan baru, seperti meningkatnya kekuatan ekonomi Jepang, dan kemajuan ekonomi negara-negara di kawasan barat daya pada umumnya.

C. Pendekatan Ekonomi - Politik dalam Hubungan Internasional

Istilah "Ekonomi-Politik" mempunyai pengertian yang bermacam-macam yang digunakan oleh para ilmuwan politik maupun ekonomi, seperti Adam Smith dan ahli ekonomi klasik lainnya mengartikan sebagai apa yang pada saat ini dikenal sebagai ilmu pengetahuan ekonomi. Sementara itu, beberapa ilmuwan seperti Gary Baker, Anthony Downs dan Bruno Frey mendefinisikan ekonomi-politik sebagai "The applications of methodology of formal economics, that is, the so called rational actor model, to all types of human behaviour." ²⁰⁾ Atau aplikasi dari metodologi ekonomi formal, yaitu apa yang dinamakan model aktor rasional terhadap semua jenis tingkah laku manusia.

Menurut Prof. Dr. Juwono Sudarsono mengatakan bahwa ekonomi politik (political-economy) pada dasarnya adalah suatu kerangka pemikiran yang berusaha untuk memajukan kesejahteraan negara, dimana politik tidak dipisahkan dari

ekonomi. 21) Sedangkan menurut salah satu dalil yang bersumber dari pemikiran neo liberalisasi di bidang ekonomi politik beranggapan bahwa perekonomian yang lebih terbuka dan kompetitif akan lebih menguntungkan bagi pertumbuhan kehidupan politik yang juga kompetitif dan terbuka.

Dengan demikian ekonomi suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan politik yang dialaminya. Keduanya saling mempengaruhi, dimana hubungan antara ekonomi dan politik paling tidak pada zaman sekarang adalah bersifat timbal balik. politik di satu pihak pada umumnya turut menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan menyalurkannya ke suatu arah demi memenuhi kepentingan kelompok-kelompok yang dominan, penerapan kekuasaan dalam segala bentuknya merupakan faktor terpenting yang dapat menentukan sifat dari suatu sistem ekonomi. Di lain pihak proses ekonomi itu sendiri cenderung mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan dan ia bisa merupakan hubungan kekuasaan antar kelompok yang pada gilirannya akan menyebabkan perubahan sistem politik. Dengan demikian akan memunculkan suatu struktur hubungan ekonomi baru.

Pusat kajian ekonomi politik dalam hubungan internasional adalah " pasar " dan " negara " yang merupakan perwujudan dari masing-masing ekonomi politik. Keduanya yaitu pasar dan negara saling berhubungan secara

timbang balik dimana kita tidak bisa menyimpulkan faktor mana yang lebih penting dari yang lainnya. Malahan hubungan mereka bersifat siklus dimana ada suatu gejala yang lebih menggambarkan dominasi faktor ekonomi dan lain pihak lagi gejala yang dominasi politik misalnya bagaimana negara dan proses politik itu yang terkait mempengaruhi produksi dan distribusi kemakmuran. Sebaliknya bagaimana dampak dari pasar dan kekuatan pasar mempengaruhi distribusi kekuasaan dan kemakmuran antar negara dan aktor-aktor politik lainnya. Yang lebih khusus adalah bagaimana kekuatan ekonomi bisa mengubah distribusi kekuatan politik dan militer internasional.

Pada masa yang silam ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang ilmu sosial tersendiri, yang dikenal sebagai ekonomi politik, yaitu pemikiran dan analisa keijaksanaan yang hendak digunakan guna memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya seperti Portugis, Spanyol, Perancis, Jerman dan sebagainya, Pada awal abad ke 18 dan abad ke 19. Dengan berkembangannya ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian terhadap tingkah laku manusia yang berbeda-beda.

Pemikiran yang berpangkal tolak pada faktor kelangkaan (scarcity) menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi

kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat planning oriented, pengaruh mana meluas pada ilmu politik sebagaimana pengertian pembangunan ekonomi (economic development) telah mempengaruhi pengertian pembangunan politik (political development). Oleh karena pilihan-pilihan tentang kebijaksanaan yang harus ditempuh seringkali terbatas sekali adanya, maka ilmu ekonomi dikenal pula sebagai ilmu sosial yang bersifat choice-oriented, hal mana telah berpengaruh pada pengkhususan penelitian mengenai decision making dalam ilmu politik modern.

Akhirnya pemikiran yang berpangkal tolak pada faktor kelangkaan telah memaksa ilmu ekonomi untuk lebih banyak berikhtiar kearah ramalan (prediction) berdasarkan perhitungan yang saksama, sehingga ilmu ekonomi modern jarang sekali bersifat spekulatif. Ikhtiar menyusun ramalan ini berpengaruh pada sebagian sarjana ilmu politik untuk mendasarkan teori dan metodologinya pada suatu pendekatan yang lebih ilmiah, yang terkenal dengan pendekatan tingkah laku (behavioral approach).

Dalam mengajukan kebijaksanaan atau siasat ekonomi tertentu, seorang sarjana ekonomi dapat bertanya pada seorang sarjana ilmu politik tentang politik manakah

kiranya yang paling baik disusun guna mencapai tujuan ekonomi tertentu.

Sebaliknya seorang sarjana ilmu politik dapat meminta bantuan dari sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomi yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan politik tertentu.

Dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern khususnya ekonomi internasional, kerjasama antara ilmu ekonomi dan ilmu politik makin dibutuhkan untuk menganalisa siasat-siasat pembangunan nasional. Seorang sarjana ilmu politik tidak dapat lagi mengabaikan pengaruh dan peranan perdagangan luar negeri, serta hubungan ekonomi luar negeri pada umumnya terhadap usaha-usaha pembangunan dalam negeri.

BAB III

HUBUNGAN EKONOMI POLITIK INDONESIA - AMERIKA SERIKAT

A. Hubungan Dan Kerjasama Ekonomi

Hubungan dan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat saat ini cukup baik dan intensitasnya meningkat dari tahun ketahun. Sebenarnya hubungan ekonomi antara kedua negara telah berlangsung beberapa abad yang lalu, ketika kapal-kapal dagang Amerika mengunjungi daerah-daerah pelabuhan di Indonesia dan membeli rempah-rempah serta mengadakan transaksi dagang lainnya. Namun hubungan dan kerjasama ekonomi antara kedua negara baru terwujud secara resmi dalam bentuk perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang diadakan dengan pertukaran nota yang ditanda tangani di Jakarta oleh wakil kedua negara pada tanggal 22 dan 24 maret 1950. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh H. Merle Cochran yang mewakili pemerintah Amerika Serikat dan M.Hatta yang mewakili pemerintah Indonesia.²²⁾

Dengan penandatanganan naskah kerjasama ekonomi tersebut maka secara resmi Indonesia dan Amerika Serikat memulai sesuatu era baru dalam hubungan dan kerjasama ekonomi. Mengingat kedua negara saling membutuhkan satu sama lain kedalam bidang ekonomi untuk mencapai

kepentingan nasional kedua negara, maka Amerika Serikat dan Indonesia memandang perlu diadakannya hubungan dan kerjasama ekonomi secara resmi sesuai dengan perkembangan kedua negara pada saat itu.

Pembangunan ekonomi merupakan unsur penting antara kedua negara khususnya bagi negara yang sedang giat membangun. Indonesia memerlukan bantuan dana dan investasi serta teknologi sebagai modal dasar dalam membangun bangsanya. Dan hal ini hanya dapat diperoleh dari negara maju seperti Amerika Serikat. Dan sebaliknya Amerika Serikat sangat membutuhkan sumber alam dan pasaran bagi hasil industrinya dan Indonesia memiliki potensi akan hal itu. atas dasar itulah maka hubungan dan kerjasama ekonomi secara resmi dilakukan oleh kedua negara .

Dalam kaitan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat maka akan ditinjau mengenai berbagai indikator dalam pola hubungan ekonomi tersebut seperti kerjasama perdagangan kedua negara, investasi, kerjasama keuangan, dan sebagainya.

1. Hubungan Perdagangan

perdagangan hanya merupakan bagian dari seluruh pola hubungan ekonomi antara dua buah negara. Dimensi-dimensi penting lainnya adalah kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dua bangsa untuk memperluas atau suatu perdagangan serta perundingan-perundingan yang tercakup didalamnya

baik secara bilateral maupun multilateral.

Dalam ekonomi Indonesia perdagangan memegang peranan penting. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan sektor perdagangan didalam keseluruhan produksi nasional serta sumbangan didalam penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kegiatan perdagangan juga mempunyai arti penting ditinjau dari segi usaha pemeliharaan kestabilan harga-harga bahan pokok dalam peningkatan penerimaan negara yang diperlukan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan.

Hubungan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat selama ini terjalin baik dan kalau diperhatikan angka ekspor dan impor maka terlihat perkembangan yang selalu menguntungkan Indonesia. Jelas keberhasilan Indonesia dimasa depan bergantung pada pengembangan non-migas. Dalam bidang ekspor barang pabrik yang sangat penting dan cepat berkembang. Amerika Serikat pada tahun 1985 mengambil bahan olahan dari Indonesia senilai 640 juta dollar AS. Ini berarti peningkatan 50 persen dalam dua tahun saja dan merupakan lebih dari dua kali impor masyarakat Eropa, pasaran nomor dua bagi Indonesia, dan 50 persen lebih tinggi dari impor Jepang. Antara tahun 1981 dan tahun 1985 impor tekstil dan pakaian jadi oleh Amerika Serikat dari Indonesia saja telah naik dari 40 juta dollar menjadi 300 juta dollar, sehingga Amerika Serikat menjadi pengimpor 50

persen ekspor tekstil Indonesia. Demikian pula dari tahun 1981 sampai tahun 1985 impor produk kayu lapis dan kayu olahan / kayu halus Amerika Serikat dari Indonesia meningkat dari kurang dari 40 juta dollar menjadi kira-kira 250 juta dollar. Itulah sedikit gambaran betapa ekspor Indonesia meningkat pesat ke Amerika Serikat.^{23>}

Upaya peningkatan ekspor ke Amerika Serikat dilakukan sebagai suatu gerakan yang terpadu dari berbagai pihak baik instansi pemerintah, perusahaan negara, perbankan, masyarakat dan mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika Serikat, yang berpedoman kepada program peningkatan ekspor ke Amerika Serikat yang telah disusun bersama.

Dari data yang diperoleh dari perdagangan RI menunjukkan nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 1980 masih tercatat 4.304 juta dollar AS, sedangkan impor Indonesia dari Amerika Serikat tercatat 1.409 juta dollar AS atau surplus bagi Indonesia sebesar 2.094 juta dollar AS. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tahun 1981 melonjak menjadi 4.852 juta dollar AS, dan impor Indonesia dari Amerika Serikat tercatat 1.795 juta dollar AS, atau surplus bagi Indonesia sebesar 3.057 juta dollar AS. Nilai ekspor Indonesia pada tahun 1982 merosot menjadi 3.546 juta dollar AS, dan impor Indonesia dari Amerika Serikat tercatat 2.411 juta dollar AS, atau surplus bagi Indonesia sebesar 2.135 juta dollar AS. Tahun 1983 nilai ekspor

Indonesia ke Amerika Serikat kembali menjadi 4.267 juta dollar AS, dan impor Indonesia dari Amerika Serikat 2.534 juta dollar AS. Sementara itu nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 1984 adalah 4.504 juta dollar AS, sedang impor Indonesia dari Amerika Serikat 2.599 juta dollar AS. Pada tahun 1985 ekspor Indonesia 4.040 juta dollar AS dan impor mencapai 1.720 juta dollar AS, yang berarti surplus bagi Indonesia 2.319 juta dollar AS.

Sementara itu nilai ekspor Indonesia pada tahun 1986 sebesar 2.901 juta dollar AS, dan impor Indonesia 1.480 juta dollar AS, atau surplus bagi Indonesia sebesar 1.421 juta dollar AS. Tahun 1987 ekspor Indonesia 3.348 juta dollar AS, dan impor 1.414 juta dollar AS atau surplus bagi Indonesia senilai 1.934 juta dollar AS. Pada tahun 1988 ekspor Indonesia 3.073 juta dollar AS dan impor 1.416 juta dollar AS atau surplus bagi Indonesia sebesar 1.657 juta dollar AS. tahun 1989 ekspor Indonesia mencapai 3.496 juta dollar AS dan impor Indonesia bernilai 1.895 juta dollar AS, atau kembali surplus bagi Indonesia sebesar 2.344 juta dollar AS.²⁴⁾ Dan untuk gambaran jelasnya mengenai perkembangan ekspor dan impor Indonesia tersebut dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Neraca Perdagangan Indonesia - Amerika Serikat

Tahun 1980 - 1990 (US \$ Juta)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca
1980	4.303	1.409	# 2.004
1981	4.852	1.795	# 3.057
1982	3.546	2.411	# 2.135
1983	4.267	2.534	# 1.733
1984	4.504	2.559	# 1.945
1985	4.404	1.720	# 2.319
1986	2.901	1.480	# 1.421
1987	3.348	1.414	# 1.934
1988	3.073	1.416	# 1.657
1989	3.496	1.751	# 1.745
1990	4.239	1.895	# 2.344

Sumber : Biro Pusat Statistik

Meskipun dari tabel tersebut di atas terlihat penurunan ekspor Indonesia atau terjadi fluktuasi, namun dalam neraca perdagangan antara Indonesia-Amerika Serikat, Indonesia tetap memperoleh surplus dalam sepuluh tahun hubungan perdagangan tersebut berlangsung. Adapun penurunan terbesar dari ekspor Indonesia ke Amerika Serikat terjadi pada tahun 1985, dimana terjadi penurunan ekspor sebesar 9,86 persen, yaitu dari 4.504 juta dolar AS pada tahun 1984 menjadi 4.040 juta dollar AS pada tahun 1985.

Adapun komoditi Indonesia yang di ekspor ke Amerika Serikat adalah minyak bumi, karet, kopi, pakaian jadi, lada rotan, minyak kelapa sawit, kayu lapis, teh, barang-barang kerajinan, rokok kretek. Sedangkan impor Indonesia dari Amerika Serikat adalah sebahagian besar barang modal berupa peralatan industri, mesin-mesin, dan bahan baku seperti barang kimia.

Pada periode tahun 1986 sampai tahun 1990 total ekspor Indonesia meningkat rata-rata 5,71 persen pertahun. Meningkatnya nilai ekspor tersebut terutama disebabkan oleh pesatnya kenaikan ekspor non-migas sejak tahun 1987. Kenaikan ekspor non-migas tersebut menyebabkan peranan ekspor non-migas secara mencolok terjadi pada tahun 1983, dengan kenaikan nominal mendekati 50 persen. Kenaikan terbesar adalah dari golongan barang-barang manufaktur.

Sebagian besar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat masih berupa Migas. Saham ekspor migas mencapai 86,2 persen dari ekspor Indonesia pada tahun 1981. Meskipun Indonesia menggalakkan ekspor non-migas pada tahun-tahun terakhir ini, namun ekspor migas masih cukup potensial sebagai andalan ekspor Indonesia khususnya ke Jepang dan Amerika Serikat.

Untuk memberi gambaran sejauh mana perkembangan ekspor Indonesia menurut jenis komoditi utama terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat
Menurut Jenis Komoditi Utama
(Juta US \$)

K o m o d i t i	1980	1981	1982	1983
Migas	3.572,0	3.518,5	2.961,5	3.394,8
Non-migas	731,3	565,3	584,5	871,9
Karet	398,0	301,9	257,0	350,5
Kayu lapis	9,4	17,7	55,5	167,6
Kopi	203,9	119,8	117,7	142,6
Pakaian jadi	7,4	37,4	59,7	83,9
Bempah-rempah	29,7	25,5	26,3	38,8
Teh	20,4	19,5	16,5	25,7
Tekstil	1,3	3,2	2,2	18,0
Lainnya	61,9	40,3	49,6	44,8

Sumber: BPS, Statistik)

Dari tabel tersebut terlihat beberapa komoditi utama yang diekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Sejak tahun 1980 sampai tahun 1983 jenis komoditi utama ekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah ; Migas, karet, kayu lapis, kopi, pakaian jadi, rempah-rempah, teh, tekstil, dan lain-lainnya. Komoditi utama ini merupakan komoditi yang mempunyai pasaran yang cukup baik di pasar Amerika Serikat.

Untuk tahun berikutnya yaitu tahun 1984 sampai tahun 1990 komoditi utama Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat makin bervariasi dan beraneka ragam seperti barang-barang furniture, sepatu, tas, dan barang-barang manufaktur lainnya, yang volume maupun nilai ekspornya cukup besar bagi usaha peningkatan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Sebagai gambaran dapat dilihat dari volume ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 1985 berjumlah 2.216,3 juta lbs, suatu kenaikan sebesar 19,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 1984, yang hanya mencapai 1.850,3 juta lbs. Dan yang mengalami kenaikan harga dan nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat antara lain; golongan minyak nabati, hewani, seperti minyak sereh, minyak pala, minyak kelapa, minyak sawit, kayu dan hasil kayu, tekstil dan pakaian jadi, sepatu, barang kerajinan, dan perhiasaan. Adapun produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat sudah

mencapai lebih dari 30 jenis komoditi sejak lima tahun terakhir 1985 - 1990, bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, dimana ekspor Indonesia adalah jenis komoditi utama atau komoditi tradisional seperti karet, kopi, teh dan rempah-rempah. 25)

Jenis-jenis komoditi yang dimaksud di atas terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3

Jenis-jenis komoditi Indonesia yang di ekspor ke AS, tahun 1986-1987 sebagai awal dari bervariasinya komoditi Indonesia yang di ekspor ke AS.

K o m o d i t i	V o l u m e		N i l a i	
	1986	1987	1986	1987
M i g a s	15.706.954	12.845.405	1.605.615	1.682.914
I k a n	587	587	1.282	1.078
U d a n g	546	1.091	4.170	8.373
K o p i	64.594	55.131	176.075	97.037
T e h	15.601	9.887	18.288	11.152
L a d a	10.554	10.782	48.811	53.671
Rempah-rempah lain	12.967	11.459	28.664	34.263
R o t a n	210	189	769	922
Minyak Kelapa Sawit	14.472	5.000	3.484	1.350
Minyak Kelapa	548	37.733	219	16.960
Minyak Biji Sawit	15.232	11.501	3.347	4.276
Fatty Acid	10.437	21.116	3.378	5.933
Biji Kakao	2.808	811	5.265	1.412
Bahan Makanan	7.007	12.681	8.497	12.180
T e m b a k a u	2.215	2.911	4.864	4.748
Kina/Produk Turunan	-	34	-	2.054
Minyak Astiri	976	1.037	11.767	12.845
K a r e t	448.596	498.728	335.699	441.216
Hides dan Skins	2	-	62	-
Leather/Leather - Product	-	41	-	2.239
Kayu Gergajian	60.433	31.749	22.940	12.845
Kayu Lapis	587.149	722.916	262.885	384.345
Mebel	1.665	1.721	2.592	3.010
Tekstil/Pakaianjadi	39.403	44.857	312.545	390.923
F o o t w e a r	90	167	847	1.907
Barang Kerajinan	1.647	1.191	9.139	5.874
Part of aircraft/ Machinery	278	107	1.901	557
B e s i / B a j a	53.790	223.119	14.134	60.727
A l u m i n i u m	137	67.860	506	847
G l a s s	1.106	1.616	606	789
L a i n - L a i n	74.427	89.613	13.109	92.021
J u n l a h	17.135.429	14.711.040	2.901.460	3.348.717

Sumber : BPS

Di pihak lain Amerika Serikat selalu mengalami defisit dari hubungan perdagangannya dengan Indonesia selama satu dasawarsa hubungan perdagangan dengan Indonesia. Adapun komoditi atau barang-barang yang diekspor Amerika Serikat ke Indonesia adalah barang-barang industri, mesin-mesin, suku cadang, bahan-bahan kimia dan obat-obatan, alat-alat komunikasi, barang-barang modal dan lain-lain. Beberapa barang-barang ekspor Amerika Serikat tersebut meskipun tidak membantu dalam menekan defisit nilai perdagangan dengan Indonesia, tetapi produk-produk ekspor Amerika Serikat tersebut sangat membantu bagi Indonesia khususnya hasil-hasil industri yang sangat diperlukan dalam pembangunan Indonesia. Bahan-bahan pupuk organik, bahan-bahan kimia hasil ekspor Amerika Serikat ke Indonesia telah banyak membantu dalam pengembangan industri dalam negeri baik itu industri kimia, maupun industri strategis lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini Amerika Serikat akan berusaha meningkatkan eksportnya ke Indonesia dan meminta jasa baik kepada Indonesia agar tidak begitu menghalangi masuknya produk dari Amerika Serikat untuk mencapai keseimbangan perdagangannya dengan Indonesia. Indonesia menikmati surplus dengan banyaknya ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan sebaliknya impor Amerika Serikat lebih banyak dari Indonesia.

Adapun neraca perdagangan Amerika Serikat dalam sepuluh tahun 1980-an adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Neraca Perdagangan Amerika Serikat - RI
Tahun 1980-1990 (US \$ Juta)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca
1980	1.409	4.303	- 2.094
1981	1.795	4.852	- 3.057
1982	2.411	3.546	- 2.135
1983	2.534	4.267	- 1.733
1984	2.559	4.504	- 1.945
1985	1.720	4.040	- 2.319
1986	1.480	2.901	- 1.421
1987	1.414	3.348	- 1.934
1988	1.416	3.073	- 1.657
1989	1.751	3.496	- 1.745
1990	1.895	4.239	- 2.344

Sumber : BPS

Dari tabel tersebut, Amerika Serikat mengalami defisit dan tentunya Indonesia memperoleh surplus. meskipun demikian impor Amerika Serikat di tahun-tahun terakhir, terutama selama masa pemerintahan Presiden

Reagan memperlihatkan gejala kenaikan mencolok tajam. Juga ekspor Indonesia ke negara itu meningkat hampir dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir.

Perdagangan luar negeri Amerika Serikat sejak beberapa tahun terakhir memperlihatkan ciri-ciri suatu ekspor yang meningkat cepat. Gejala menurunnya potensi ekspor Amerika Serikat dan sebaliknya meningkatnya impor antara lain disebabkan oleh :

- a. Meningkatnya nilai dollar Amerika Serikat di pasaran moneter internasional, yang menyebabkan bahwa perdagangan ekspor menjadi lebih mahal dan lebih sulit bersaing, sedangkan perdagangan impornya lebih mudah dan lebih murah.
- b. Pulihnya ekonomi Amerika Serikat di tahun-tahun 1983 dan tahun 1984 dari resesi tahun-tahun sebelumnya, sehingga menimbulkan permintaan yang membesar untuk kebutuhan dalam negerinya.
- c. Masalah membungunya hutang-hutang negara berkembang yang merupakan pasarannya (Meksiko, Brazil, Philipina dan negara Asia lainnya, hingga negara-negara tersebut membatasi impor-impornya demi penghematan. 26)

Melonjaknya impor Amerika Serikat mengakibatkan defisit neraca berjalan Amerika Serikat meningkat pula. Dan hal ini telah dimanfaatkan oleh Indonesia, seperti juga negara-negara lain dengan menjual lebih banyak

barangnya ke Amerika Serikat. Indonesia berhasil meningkatkan eksportnya ke pasaran Amerika Serikat, sehingga perbaikan ekonomi Indonesia setelah mengalami resesi tahun 1982 yang terutama disebabkan oleh meningkatnya ekspor dan barang-barang ke luar negeri.

Akibat lain dari membanjirnya impor Amerika Serikat ialah timbulnya desakan yang semakin kuat dari insustri dalam negerinya untuk mendapatkan perlindungan berupa pembatasan-pembatasan impor. Hal ini membawa masalah terhadap negara-negara berkembang yang terutama mengandalkan eksportnya seperti Indonesia. jalan keluar untuk memecahkan masalah ini adalah dengan mengadakan pembicaraan guna memecahkan hambatan-hambatan perdagangan kedua negara.

Hembengkaknya defisit neraca berjalan Amerika Serikat karena meningkatnya impor negara tersebut dan sangat meningkatnya arus modal ke negara itu, jelas mempunyai dampak pada arus barang maupun arus modal internasional. Dan hal ini tentunya mempunyai dampak pula pada perekonomian Indonesia. Hal ini juga mempunyai kosekwensi luas bagi perkembangan ekonomi Amerika Serikat. Pengaruh lain dari perubahan neraca pembayaran Amerika Serikat tersebut, yaitu seja defisit neraca berjalan Amerika Serikat itu disertai dengan semakin meningkatnya nilai tukar dollar Amerika Serikat terhadap mata uang asing

lainnya, maka selama periode itu telah terjadi pergeseran arah ekspor Indonesia. Yang biasanya ditujukan ke Eropa dan negara-negara lain, banyak dialihkan ke pasaran Amerika Serikat. Salah satu akibatnya dalam jangka panjang akan kurang menuntungkan, ialah banyak langganan-langganan lama di Eropa yang selama bertahun-tahun biasa mengimpor barang-barang dari Indonesia mengalami kesulitan mendapatkan barang dari Indonesia, oleh karena eksportir Indonesia lebih tertarik menjualnya ke Amerika Serikat.

2. Investasi Dan Bantuan Modal Amerika Serikat

Salah satu pola hubungan dan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat adalah investasi dan bantuan modal Amerika Serikat untuk pembangunan di Indonesia. Khusus bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat membangun investasi dan bantuan modal sangat vital dalam rangka memacu pembangunan Indonesia. Oleh karena itu Indonesia sangat mengaharpkan Amerika Serikat lebih banyak berperan dalam menanamkan modalnya dan pemberian bantuan bagi pembangunan di Indonesia, sebagai salah satu bagian dari hubungan ekonomi kedua negara yang telah ada.

Indonesia memerlukan kerja sama ekonomi dan pinjaman luar negeri termasuk investasi dari negara-negara sahabat tanpa membedakan antara negara barat dan timur. Dan persyaratan pinjaman tidak saja seringan mungkin, tetapi

Juga yang memungkinkan Indonesia membayarnya kembali serta penggunaannya yang ditentukan sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan Indonesia.

Investasi mempunyai peranan dalam pembentukan produk domestik bruto Indonesia. Peranan investasi terhadap PDB selama periode 1985 -1989 terus meningkat yaitu 23,06 persen tahun 1985 menjadi 23,78 persen pada tahun 1986. Dan pada tahun 1987 sebesar 23,91 persen menjadi 25,22 persen pada tahun 1988 dan pada tahun 1989 menjadi 22,62 persen.

Amerika Serikat termasuk negara yang banyak melakukan investasi di Indonesia. Lebih dari tujuh puluh perusahaan Amerika Serikat yang terlibat dalam penanaman modal bernilai ratusan juta dollar untuk sektor non-migas yang tercatat sampai tahun 1987. Investasi Amerika Serikat yang telah disetujui pemerintah sampai dengan Maret 1985 bernilai 937,8 juta dollar AS untuk 92 proyek pembangunan. Investasi tersebut meliputi bidang-bidang usaha kertas, kimia, barang logam, konstruksi, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan makanan. Di luar investasi perminyakan dan perbankan. Dengan jumlah tersebut Amerika Serikat menduduki tempat ke tiga dalam urutan negara-negara penanam modal di Indonesia. Di samping itu dalam usaha mendorong kegiatan investasi tersebut, di Washington telah didirikan United States - Indonesia Joint Investment

Council, yang anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah Amerika Serikat, organisasi swasta, serta wakil dari KBRI Washington. 27)

Adapun secara lengkap jumlah proyek dan investasi atau pledge bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 5
Pledge Bantuan Amerika Serikat
(Proyek dan nilai investasi)
dalam jutaan dollar AS

Tahun	Jumlah Proyek	Investasi
1980/1981	6	54,6
1981/1982	4	33,9
1982/1983	5	43,3
1983/1984	5	49,8
1984/1985	9	94,8
1985/1986	14	138,8
1986/1987	15	157,2
1987/1988	18	172,5
1988/1989	17	180,6
1989/1990	18	210,4

Sumber : BPS

Dari tabel tersebut terlihat bahwa bantuan Amerika Serikat untuk membantu pembangunan Indonesia meningkat dari tahun-ketahun, kecuali pada tahun 1981/1982 mengalami penurunan dari jumlah proyek dan nilai investasi. Penurunan bantuan ini karena keadaan dalam negeri Amerika Serikat khususnya kebijaksanaan pemerintah mengenai pengurangan bantuan luar negeri, mengingat keadaan ekonomi dalam negeri Amerika Serikat yang kurang menguntungkan. Sedang pada periode tahun 1988/1989 juga berkurang dari periode sethun sebelumnya, namun pengurangan tersebut tidak begitu besar, baik dari jumlah proyek maupun investasi.

Sebagai anggota IGGI yang mengkoordinasikan bantuan internasional bagi upaya pembangunan Indonesia, Amerika Serikat memberi bantuan rata-rata 100 samapai 150 juta dollar setahun dalam waktu sepuluh tahun terakhir (selama tahun 1980-an). Amerika Serikat juga menjadi penyumbang terbesar pada lembaga-lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan bank Pembangunan Asia yang telah berlangsung pada tanggal 4 - 5 juni.1985 telah menyetujui pemberian bantuan kepada Indonesia untuk tahun fiskal 1986 dengan pemberian pledge pada Indonesia, sebesar 100 juta dollar AS ²⁰)

Adapun jumlah bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia sejak dimulainya orde baru sampai tanggal 30

Desember 1985 seluruhnya mencapai jumlah 2.469,6 juta dollar AS yang meliputi bantuan proyek, yang persetujuannya sudah ditandatangani, dan 436,7 juta dollar AS berupa bantuan hibah untuk PL-480 Title II dan teknik. Adapun perincian bantuan tersebut di atas adalah sebagai berikut : (dalam US \$ juta)

Jenis Bantuan	1966-1983	1984	1985	jumlah
PL-480 Title I	1.370,5	40,0	40,0	1.450,5
Devisa Kredit	286,5	-	-	286,5
Proyek-Proyek	66,7	45,2	23,8	732,7
PL-480 Title II/ hibah	148,6	7,6	7,7	163,9
Bantuan teknik/ hibah	219,8	18,6	34,4	272,8

Adapun bantuan proyek Amerika Serikat kepada Indonesia untuk tahun fiskal 1985 yang tersebut dalam " Operating Year Budged" US ID adalah sebesar 66.265.000 dollar AS.²⁰⁾ untuk bantuan berupa :

- (1) Pinjaman sebesar 31.825.000 dollar AS
- (2) Grant/hibah 34.440.000 dollar AS

Adapun bantuan Amerika Serikat untuk Indonesia untuk Indonesia pada periode 1986, 1987 samapi tahun 1990 masih berkisar antara 80 sampai 150 juta dollar AS, yang meliputi bantuan proyek maupun devisa kredit. Bantuan

pangan tidak diberikan lagi pada periode tersebut di atas mengingat Indonesia sudah dapat berswasembada pangan. Melalui kerjasama keuangan Indonesia juga telah banyak mendapatkan banyak manfaat dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara yang masuk dalam agenda pemerintah Indonesia untuk memainkan peranan yang aktif dalam pembangunan Indonesia.

Mengingat peranan Amerika Serikat yang sangat dominan pada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Duni dan IGGI, diharapkan Amerika Serikat mempergunakan pengaruhnya terhadap lembaga keuangan internasional tersebut dengan syarat lunak agar Indonesia dapat membiayai pembangun nasional.

Itulah sekelumit gambaran hubungan dan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat, khususnya dalam bidang perdagangan, investasi dan bantuan keuangan yang makin baik dari tahun-ke tahun.

B. Hubungan dan Kerjasama Politik

Sebagai negara yang merdeka dan mengnut politik luar negeri bebas aktif, sejak lama Indonesia menjalin hubungan politik dengan negara-negara lainnya termasuk Amerika Serikat. Hubungan itu dilakukan tanpa melihat perbedaan pokok dalam idiologi maupun latar belakang negara masing-masing, sepanjang negara tersebut tidak merusak kepentingan nasional Indonesia.

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dilaksanakan untuk mengusahakan lahirnya pengertian yang tepat mengenai dasar dan tujuan revolusi Indonesia yang menghendaki persahabatan dan kerja sama di bidang ekonomi, teknik atas dasar persamaan derajat dan keuntungan bersama, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme.

Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia di bidang politik luar negerinya yang diharapkan dapat memberikan hasil bagi pembangunan nasional. Dalam hubungan ini pemerintah Amerika Serikat juga mempunyai arti yang tidak kecil dalam memberikan dukungan terhadap garis kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia di lembaga lembaga dan forum-forum internasional, walaupun selama ini masih dirasakan adanya perbedaan pendapat dan kepentingan yang sama di forum internasional.

Pada dasarnya Amerika Serikat tetap menempatkan Indonesia pada posisi penting dalam politik luar negerinya. Selain itu bagi Amerika Serikat Indonesia mempunyai kedudukan strategi, baik dalam kepentingan bilateral maupun regional, terlebih lagi Indonesia selama ini memperlihatkan kemajuan-kemajuan pesat dalam pembangunan ekonomi dan dalam mempertahankan stabilitas nasional maupun kawasan.

Hal-hal yang menonjol yang mewarnai hubungan politik

kedua negara adalah adanya saling kunjungan antar para pejabat kedua negara dalam periode 1980-an dalam rangka menjalin persahabatan dan pengertian politik antara kedua negara juga diwarnai oleh perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional mengenai wawasan Nusantara dalam konvensi Hukum laut yang ketiga pada tahun 1982, dimana Amerika Serikat menolak meratifikasi konvensi tersebut. Masalah pelaksanaan hak asasi manusia di Timor-Timur oleh sejumlah kalangan dan kongres di Amerika Serikat yang menghangat pada periode tahun 1980-an Masalah Interhasional, Property Rights dan masalah-masalah lainnya seperti perbedaan dalam memandang masalah-masalah internasional.

Semakin baiknya hubungan antara kedua negara tercermin dari berbagai kegiatan dan adanya saling mengunjungi antara para pejabat kedua negara dalam usaha untuk mendekatkan saling pengertian dan memecahkan serta mencari penyelesaian atas masalah-masalah politik antara kedua negara. Tindak lanjut dari keadaan tersebut tercermin dari kunjungan Presiden Reagan ke Bali pada bulan Mei 1986, yang menghasilkan berbagai kesempatan dari pembicaraan antara Presiden Soeharto dengan Presiden Reagan. Selain menghasilkan berbagai kesempatan politik seperti penegasan Amerika Serikat untuk memberi dukungan bagi konsep Asean tentang NWFZ di kawasan Asia Tenggara,

penjelasan tentang keadaan politik di Indonesia dan pelaksanaan hak asasi dan demokrasi serta masalah-masalah ekonomi yang antar lain menghasilkan keputusan untuk pembukaan jalur penerbangan Garuda Indonesia pada bulan Nopember 1987 dan kesediaan pihak Amerika Serikat untuk meluncurkan satelit Palapa B2R pada tahun 1989, dan persetujuan Amerika Serikat bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang pertama membeli super computer bagi IPTN.³⁰⁾

Di samping itu terlihat pula adanya kunjungan antara pejabat tinggi kedua negara antara lain kunjungan sejumlah Senator dan anggota Kongres Amerika Serikat ke Indonesia, pertemuan Menteri Luar Negeri kedua Negara, dalam rangka memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai garis/kebijaksanaan politik kedua negara.

Perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional mengenai Wawasan Nusantara, telah dilakukan berbagai upaya di forum internasional melalui konfrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Dalam konfrensi Hukum Laut yang ketiga oleh PBB pada tahun 1982 Indonesia menyadari bahwa permasalahan yang dibahas dalam konfrensi tersebut sangat rumit, hal ini disebabkan perbedaan kepentingan negara-negara yang satu sama lainnya sangat menonjol. Namun demikian dalam konfrensi tersebut Indonesia berjuang keras untuk dapat

mewujudkan pengakuan dunia terhadap konsepsi negara kepulauan tersebut. Tahun 1982 telah ditanda tangani konvensi Hukum Laut yang baru berarti keseluruhan konsep keutuhan wilayah nasional Indonesia yang tercakup dalam Wawasan Nusantara telah mendapat pengakuan internasional. Telah 159 negara menyatakan menerima konvensi tersebut dan bahkan beberapa negara telah meratifikasinya, namun demikian masih ada negara yang belum menerima konvensi tersebut seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat belum tegas menerima Wawasan Nusantara. Hal ini yang disayangkan oleh Indonesia atas penolakan Amerika Serikat tersebut dan membuat hubungan kedua negara agak surut. 31)

Untuk itu Indonesia mengaharapkan dalam kurun waktu yang tidak lama Amerika Serikat akan meninjau kembali posisi dalam masalah ini dan mau menerima konvensi tersebut sebagai satu-satunya kerangka hukum bagi kerjasama dunia di bidang maritim. dan sebagai pengormatan terhadap hubungan yang selama ini telah ada dengan Indonesia. Khususnya bagi Pasifik kerangka hukum semacam ini sangat penting artinya untuk menghadapi makin ketatnya persaingan kekuatan-kekuatan dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang dan RRC di kawasan itu.

Mengenai sikapnya yang tidak sejalan dengan anggota kongres, maka pemerintah Amerika Serikat berusaha memainkan peranan yang seimbang tanpa keluar dari posisi

dasar tersebut. Pengamatan sampai saat ini menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat bersikap simpatik dan dalam berbagai forum internasional selalu mendukung posisi Indonesia dalam masalah ini. Bahkan Amerika Serikat merupakan negara-negara yang termasuk menentang resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merugikan Indonesia. Pada tahun 1980, 1981, dan tahun 1982 dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Amerika Serikat selalu memberi dukungan bagi Indonesia atas masalah Timor-Timur.

State Department Amerika Serikat secara konsisten membela Indonesia dalam hearing di kongres yang tidak menyetujui kebijaksanaan pemerintah. Demikian pula dalam seminar-seminar yang sering disponsori oleh unsur-unsur yang memusuhi Indonesia, pemerintah Amerika Serikat selalu memberi dukungan kepada Indonesia sebagai salah satu bahagian dari hubungan kedua negara khususnya dalam hubungan politik.

Salah satu cerminan dari hubungan politik yang makin baik antara kedua negara adalah kunjungan Presiden Soeharto ke Amerika Serikat pada tanggal 12 Oktober 1982, dan kunjungan Presiden George Bush ke Indonesia pada tanggal 12 Mei 1984, merupakan salah satu komitmen kedua negara dalam meningkatkan hubungan bilateral yang lebih baik.

Mengenai masalah intelektual antara lain meliputi hak cipta pengarang, patent untuk melindungi hasil penemuan

baru, merk dagang, desain industri, merupakan salah satu masalah yang paling aktual yang mengganjal hubungan kedua negara, khususnya pada tahun 1980-an.

Masalah Intelektual Property Rights merupakan salah satu hal yang paling menonjol dalam rangka hubungan bilateral Amerika Serikat - Indonesia. Masalah tersebut pada tahun 1986 menjadi pusat perhatian baik diantara kalangan administrasi maupun kongres dan swasta, khususnya setelah terjadi peristiwa penahanan Dharmawan di New York karena tuduhan berusaha memasukkan kaset bajakan. Kasus tersebut telah digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan usahanya mendesak Indonesia memperbaiki tindakan perlindungan terhadap Intellectual Property Rights (IPR).

Sudah menjadikebijakan Amerika Serikat untuk mempergunakan segala macam cara untuk mempertahankan legal rights dan kepentingan perdagangannya (politik perdagangannya) yang berkaitan dengan patent, copyright dalam forum multilateral dan bilateral. Dalam bidang ini kebijaksanaan Amerika Serikat banyak berbenturan dengan sikap negara-negara berkembang antar lain Indonesia yang karena salah satu dan lain hal belum merasa mendesak untuk mempunyai undang-undang hak milik intelektual. Namun dalam perkembangan terakhir Indonesia telah mengambil langkah-langkah ke arah terwujudnya undang-undang yang

dimaksud.

Itulah berbagai hal dan masalah yang mewarnai hubungan politik antara Indonesia dengan Amerika Serikat pada periode tahun 1980-an. Walaupun terdapat berbagai masalah, namun hubungan kedua negara sampai saat ini masih baik dan berkembang.

BAB IV

ANALISA HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - AMERIKA SERIKAT
SUATU TINJAUAN EKONOMI - POLITIK

A. Hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat selama satu dasawarsa (1980 - 1990) mengalami peningkatan yang cukup berarti, kendati selama satu dasawarsa hubungan ekonomi tersebut Indonesia memperoleh banyak manfaat dan surplus, terutama di bidang perdagangan. Dan meskipun Amerika Serikat mengalami defisit dalam perdagangannya dengan Indonesia, namun secara keseluruhan ekspor Amerika Serikat ke Indonesia selama satu dasawarsa tersebut lebih meningkat baik dari segi nilai maupun volume, bila dibandingkan dengan volume dan nilai ekspor Amerika Serikat pada tahun 1970-an.

Indonesia memperoleh surplus dari perdagangannya dengan Amerika Serikat terlihat dari neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat yang selalu bernilai positif, karena meningkatnya ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, bila dibandingkan dengan ekspor Amerika Serikat ke Indonesia. Meskipun hubungan perdagangan kedua negara berfluktuasi, namun pangsa pasar Amerika Serikat dan pangsa pasar di Indonesia masih cukup besar untuk peningkatan ekspor kedua negara.

Dari neraca perdagangan Indonesia ke Amerika Serikat ekspor ¹⁹⁸⁰ 4,30 milyar dollar AS. Dan pada tahun 1981 ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mengalami penurunan menjadi 4,08 milyar dollar AS. Pada tahun 1982 mengalami penurunan kembali menjadi 3,5 milyar dollar AS, namun mengalami peningkatan pada tahun 1983, karena meningkatnya permintaan barang-barang manufaktur di Amerika Serikat sehingga Indonesia berhasil meningkatkan eskpornya dan kembali nilai ekspor Indonesia meningkat menjadi 4,3 milyar dollar AS. Pada tahun 1984 ekspor Indonesia meningkat lagi menjadi 4,5 milyar dollar AS. Dan selama tahun 1985 ekspor Indonesia kembali menurun menjadi 4,04 milyar dollar AS, akibat memburuknya perekonomian Amerika Serikat pada tahun tersebut sehingga permintaan barang-barang dari Indonesia menurun dan para eksportir pada tahun tersebut membatasi eksponya.

Dalam lima tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1986 ekspor Indonesia ke Amerika Serikat juga mengalami penurunan yaitu 2,90 milyar dollar AS. Pada tahun 1987 ekspor Indonesia naik kembali menjadi 3,34 milyar dollar AS. Kenaikan ekspor tersebut tidak bertahan lama dan menurun kembali setahun berikutnya yaitu tahun 1988 menjadi 3,07 milyar dollar AS. Pada tahun 1989 naik kembali menjadi 3,49 milyar dollar AS, dan akhirnya menurun kembali pada tahun 1990 menjadi hanya 4,23 milyar

dollar AS.

Dari nilai impor Indonesia dari Amerika Serikat yang berarti ekspor bagi Amerika Serikat juga memperlihatkan suatu nilai impor yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1980 impor Indonesia sebesar 1,40 milyar dollar AS. tahun 1981 1,79 milyar dollar AS atau meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 1982 meningkat lagi menjadi 2,42 milyar dollar AS, tahun 1983 2,53 milyar dollar AS, dan tahun 1984 sebesar 2,56 milyar dollar AS. Dan pada tahun 1985 impor Indonesia sebesar 1,62 milyar dollar AAS, sehingga total impor Indonesia selama lima tahun tersebut bernilai 12,32 milyar dollar AS.

Dalam lima tahun berikutnya yaitu dari tahun 1986 hingga tahun 1990 impor Indonesia adalah pada tahun 1986 tercatat 1,48 milyar dollar AS, tahun 1987 sebesar 1,41 milyar dollar AS, dan pada tahun 1988 meningkat menjadi 3,07 milyar dollaar AS yang merupakan nilai impor tersbesar bagi Indonesia dari Amerika Serikat selama periode tahun 1980-an. Pada tahun 1989 impor Indonesia menurun kembali menjadi 1,76 milyar dollar AS dan akhirnya pada tahun 1990 menjadi 1,85 milyar dollar.

Dari data neraca perdagangan tersebut diatas terlihat bahwa Indonesia menikmati surplus selama satu dasawarsa dalam hubungan perdagangannya dengan Amerika Serikat, dimana ekspor utama Indonesia adalah minyak bumi dan gas

alam di samping ekspor barang-barang non-migas. Pada tahun 1984 jumlah ekspor migas mencapai 3,2 milyar dollar AS. Karet alam ekspornya mencapai nilai 466 juta dollar AS. Berikutnya adalah pakaian jadi dan produk tekstil bernilai masing-masing 236 juta dollar AS dan 234,2 juta dollar AS, pada periode tahun 1984 dan 1985. Produk kopi ternyata juga berperan dalam peningkatan ekspor Indonesia dengan nilai ekspor 163,8 juta dollar pada tahun 1984 dan pada tahun 1985 mencapai 158,8 juta dollar AS. »»

Ekspor kayu dan produk industri lainnya juga memberi nilai ekspor yang cukup besar yaitu 190 juta dollar AS pada tahun 1982 dan 1984, meningkat menjadi 269 juta dollar AAS pada tahun 1985. Sedang nilai ekspor rempah-rempah bernilai 50,5 juta dollar AS pada tahun 1984.

Pada tahun 1986 ekspor migas Indonesia ke Amerika Serikat bernilai 15,7 juta dollar AS dan menurun pada tahun 1987 sehingga hanya mencapai 12,8 juta dollar AS. Dalam tahun 1988 nilai ekspor nonmigas ke Amerika Serikat naik sekitar 15,39 persen. Sedang nilai ekspor migas turun 28,70 persen dibandingkan dengan tahun yang sama pada tahun 1987.

Impor Indonesia dari Amerika Serikat baik non-migas maupun migas menurun. Impor non-migas menurun dari US \$ 620,2 juta menjadi US\$ 527,2 juta atau turun 17,5 persen, sedangkan impor migas turun dari US\$ 14,9 juta menjadi US\$ 8,2 juta atau turun 82 persen. Secara keseluruhan

dalam periode sampai dengan September 1987 impor dari Amerika Serikat menurun 18,5 persen, yaitu dari US\$ 635,1 juta menjadi US\$ 535,8 juta.

Surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat sampai dengan September 1987 mencapai sebesar US\$ 2,054,7 juta. Besarnya surplus perdagangan ini disebabkan oleh membaiknya ekspor non-migas Indonesia, yaitu meningkat 18,4 persen dan menurunnya impor dari Amerika Serikat dalam jumlah yang cukup besar, yaitu 18,5 persen.

Menurut kelompok barang, ekspor Indonesia yang meningkat, yaitu kelompok bahan mentah sebesar 26,7 persen, yaitu dari US\$ 253,6 juta menjadi US\$ 321,2 juta, kelompok hasil industri menurut bahan sebesar 35,23 persen, yaitu dari US\$ 273,6 juta menjadi US\$ 370,1 juta, kelompok hasil lainnya meningkat dari US\$ 201,1 juta menjadi US\$ 289,9 juta atau meningkat 3,3 persen, yaitu dari US\$ 15,3 juta menjadi US\$ 15,8 juta. 33)

Kelompok barang yang ekspornya menurun, yaitu bahan makanan dan binatang hidup sebesar 21,5 persen, yaitu dari US\$ 251,7 juta menjadi US\$ 197,6 juta, minuman dan tembakau turun 1,9 persen, minyak/lemak nabati 2,1 persen, mesin dan alat pengangkutan 51,3 persen, yaitu dari US\$ 13,8 juta menjadi US\$ 6,7 juta dan kelompok barang dan transaksi khusus lainnya menurun 1,8 persen, yaitu dari US\$ 5,8 juta menjadi US\$ 5,7 juta.

Dalam kelompok makanan dan binatang hidup terdapat peningkatan ekspor untuk beberapa mata dagangan, yaitu ikan dan udang meningkat 38,7 persen, yaitu dari US\$ 9.436.220 menjadi US\$ 13.093.366 juta, rempah-rempah meningkat 93,7 % yaitu dari US\$ 42.518.699 menjadi US\$ 82.254.620 juta. namun mata dagangan utama dikelompok ini ekspornya menurun yaitu kopi dari US\$ 172.477.781 menjadi US\$ 80.774.494 atau turun 53,2 %, teh menurun dari US\$ 18.969.127 menjadi US\$ 12.520.768 (turun 34,0 %) dan coklat menurun 75,5 % yaitu dari US\$ 2.302.057 menjadi US\$ 479.642.

Untuk kelompok minuman dan tembakau terlihat ada perbaikan ekspor rokok dan cerutu masing-masing meningkat 14,6 untuk rokok yaitu dari US\$ 676.515 menjadi US\$ 775.165 dan cerutu merupakan mata dagangan baru yang belum ada sebelumnya, ekspor sebesar US\$ 1.105. Ekspor tembakau belum diolah meningkat 546,7 % dari US\$ 365.939 menjadi US\$ 2.774.630.

Mata dagangan utama dikelompok bahan mentah yaitu karet dan kayu gergajian. Ekspor karet meningkat 25,5 % yaitu dari US\$ 244.934.894 menjadi US\$ 307.441.855 dan kayu gergajian untuk softwood meningkat 61,5 % yaitu dari US\$ 48.328 menjadi US\$ 78.072 dan untuk hardwood meningkat 78,4 % yaitu dari US\$ 6.691.165 menjadi US\$ 11.936.141.

Dikelompok minyak/lemak nabati dan hewan terdapat

mata dagangan yang eksportnya meningkat sangat besar yaitu minyak kelapa meningkat 854,1 % yaitu dari US\$ 507.058 menjadi US\$ 4.837.708. Mata dagangan utama lainnya menurun yaitu minyak kelapa sawit turun 53,2 % yaitu dari US\$ 3.539.586 menjadi US\$ 1.657.693 dan palm kerner oil menurun 50,5 % yaitu dari US\$ 5.168.883 menjadi US\$ 2.559.097.

Dalam kelompok bahan kimia terdapat 20 jenis mata dagangan yang jumlah eksportnya masing-masing masih relatif kecil, yang terbesar hanya minyak atsiri yang eksportnya meningkat 6,5 % yaitu dari US\$ 9.565.241 menjadi US\$ 19.182.483.

Mata dagangan utama dikelompok hasil industri menurut bahan eksportnya meningkat yaitu tekstil meningkat 46,6 % yaitu dari US\$ 25.952.053 menjadi US\$ 38.037.887, ban mobil nilai eksportnya telah mencapai US\$ 572.880, tahun sebelumnya hanya sebesar US\$ 4.887, produk kayu meningkat dari US\$ 7.020.443 menjadi US\$ 13.939.518 atau meningkat 98,6 %, produk dari besi dan baja meningkat dari US\$ 8.311.662 menjadi US\$ 32.649.838 atau meningkat 194.394.440 menjadi US\$ 249.365.195. 34)

Dalam kelompok hasil industri lainnya mata dagangan utama yang meningkat eksportnya yaitu pakaian jadi dari US\$ 189.064.790 menjadi US\$ 271.183.473 atau meningkat 43,4 %, mebel eksportnya meningkat 80,8 % yaitu US\$

1.985.165 menjadi US\$ 3.589.218 dan jewelry meningkat dari US\$ 2.016.846 menjadi US\$ 2.571.364 atau 27,5 %.

Defisit neraca berjalan Amerika Serikat yang terus meningkat beberapa tahun terakhir ini membantu Indonesia memasarkan lebih banyak barangnya ke Amerika Serikat. Menurut perkiraan IMF dalam tahun 1983 permintaan luar negeri naik 7,1 % . Bahkan pada tahun 1984 naik menjadi 15,4 % . Permintaan luar negeri yang besar tersebut mendorong pertumbuhan GDP Indonesia, 5,3 % pada tahun 1983 dan 6,7 % pada tahun 1984. Pemulihan kembali perekonomian Indonesia setelah mengalami resesi pada tahun 1983 dan 1984 adalah berkat pengembangan ekspor. Dan salah satu pasaran yang paling potensial adalah pasaran Amerika Serikat.

Walaupun dalam sepuluh tahun (1980-1990) lalu lintas perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat sering mengalami hambatan baik itu sistem-sistem kuota dan hambatan tarif, namun dalam nilai devisa perdagangan antara kedua negara memperlihatkan perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Dalam periode tersebut nilai devisa yang tercakup dalam lalu lintas perdagangan antara kedua negara meningkat dari sekitar 3 milyar dollar AS menjadi 7 milyar dollar AS setahun, atau lebih dari dua kali lipat.

Bagi Indonesia, Amerika Serikat masih tetap bertahan

sebagai partner dagang Indonesia kedua terbesar setelah Jepang, yang di tahun-tahun terakhir ini nilai perdagangannya berjumlah tak kurang dari 15 - 17 milyar dollar AS. Sedang Amerika Serikat sendiri mengalami defisit perdagangan dengan Indonesia berkisar 1,9 hingga 3 milyar dollar AS. Andil defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia itu dalam sepuluh tahun terakhir telah menumpuk secara kumulatif hingga lebih dari 20 milyar dollar AS. Dari kenyataan itulah, maka perkembangan ekonomi Amerika Serikat dibarengi dengan berbagai gejala ekonomi yang dihadapinya ditandai dengan defisit anggaran belanjanya dan defisit perdagangan luar negerinya, tentunya dapat mengguncangkan sendi-sendi perekonomian Amerika Serikat. Disamping itu pemerintah Reagan berusaha meningkatkan pasar di luar negeri dengan menekan mitra dagangannya untuk membuka pasar bagi produk dan jasa-jasa dari Amerika Serikat dengan mendorong terciptanya perdagangan dunia yang bebas dan adil serta bertekad untuk tidak melakukan tindakan proteksionis karena dianggap akan menimbulkan kerugian bagi Amerika Serikat.

Dalam bidang investasi dan bantuan modal Amerika Serikat kepada Indonesia sebagai bahagian dari kerjasama ekonomi kedua negara telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi pembangunan Indonesia dan di sisi lain Amerika Serikat juga memperoleh manfaat dalam mengembangkan

investor-investor dalam negerinya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Indonesia menyadari bahwa suatu negara berkembang pasti mengalami masalah pembangunan ekonomi. Untuk itu maka pembangunan ekonomi Indonesia menempati prioritas tertinggi. Dalam rangka kerjasama ekonomi maka Indonesia sangat memerlukan bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi tersebut.

Amerika Serikat termasuk negara utama yang memberikan bantuan keuangan dan investasi kepada Indonesia, baik yang diberikan secara langsung, maupun melalui lembaga-lembaga Internasional seperti IGGI. Bantuan Amerika Serikat dalam bentuk bantuan devisa kredit dan bantuan pangan merupakan sumber tambahan bagi pembiayaan impor barang modal, bahan baku dan pangan yang dibutuhkan untuk mempercepat laju pembangunan.

Kerjasama ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat dimulai pada tahun 1950, ketika wakil-wakil pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia yang baru merdeka menandatangani perjanjian kerjasama teknik dan ekonomi. Selama 41 tahun pertama Amerika Serikat telah memberikan 3,5 milyar dollar AS untuk pembangunan dan bantuan dalam bentuk pinjaman, hibah, dan bantuan pangan. Sampai tahun 1986 jumlah bantuan dan pinjaman Amerika Serikat telah mencapai 2,1 milyar dollar AS. Hibah bantuan teknik

569,9 juta dollar AS dan hibah bantuan program pangan berjumlah 202,3 juta dollar AS. Sebagai anggota IGGI yang mengkoordinasikan bantuan internasional bagi upaya pembangunan Indonesia, Amerika Serikat memberikan bantuan rata-rata 100 samapai 125 juta dollar AAS setahun dalam waktu 10 tahun terakhir ini.

Bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Indonesia sejak awal tahun 80-an terus berkurang, akibat akan dilaksanakannya Gramm-Rudman-Holling Legislation. Hal ini dapat dilihat dari pledge bantuan Amerika Serikat tahun fiskal 1985-1986, sebagai tahun fiskal dalam pelaksanaan Gramm-Rudman-Hollings Legislation. Pledge bantuan Amerika Serikat untuk tahun fiskal 1985/1986 yang dalam sidang IGGI telah disampaikan adalah sebesar 100 juta dollar AS. Kelihatannya bantuan ini akan terus berkurang, walaupun ada kenaikan dari tahun sebelumnya tapi kenaikan tersebut tidak begitu besar. Hal ini disebabkan oleh kebijaksanaan pengurangan anggaran belanja secara menyeluruh oleh Pemerintah Reagan. demikian pula diperkirakan akan terjadi pengurangan dalam komitmennya untuk tahun fiskal 1986/1987, dari tahun-tahun sebelumnya.

Walaupun bantuan dan investasi Amerika Serikat mengalami sedikit penurunan, namun Amerika Serikat masih tetap sebagai negara investor terbesar ketiga bagi pembangunan Indonesia, dengan jumlah investasi 1.021,4

juta dollar AS, yang berarti 6,8 % jumlah keseluruhan investasi asing di Indonesia.

Keberhasilan Indonesia dalam bidang pembangunan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia serta stabilitas dalam negeri Indonesia yang cukup baik dan mantap, merupakan pendorong bagi para investor asing, khususnya para investor Amerika Serikat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Keberhasilan ekonomi Indonesia secara keseluruhan serta diibarengi oleh potensi ekonomi kelompok negara-negara di kawasan Asean merupakan faktor-faktor penting yang sangat menunjang perkembangan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Dan sebagai realisasi dari kebijaksanaan bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Indonesia, maka pada tanggal 13 juli 1984 di Jakarta telah diadakan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Indonesia dengan Amerika Serikat mengenai kerja sama di bidang penanaman modal asing. kerjasama ini merupakan pokok kesepakatan tentang prinsip-prinsip kerjasama dalam rangka memberikan dorongan bagi peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal Amerika Serikat di Indonesia. Dalam rangka ini Indonesia dan Amerika Serikat sepakat melakukan langkah-langkah peningkatan promosi investasi, seperti mengadakan studi kelayakan yang kemudian hasilnya ditawarkan kepada pihak swasta kedua negara untuk mengadakan usaha bersama.

Bantuan proyek Amerika Serikat kepada Indonesia sebagai realisasi kerjasama dan merupakan bagian dari kesepakatan saling pengertian tersebut telah berhasil meningkatkan aktivitas berbagai proyek dalam negeri. Adapun proyek-proyek bantuan tersebut seperti proyek-proyek listrik, telekomunikasi, pengairan, pertambangan, pendidikan, Keluarga Berencana, dan prasarana lainnya. Jumlah bantuan proyek yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia sampai tahun 1985 sebanyak 732,7 juta dollar AS, namun yang baru dimanfaatkan 511,6 juta dollar AS.

Bagi Amerika Serikat sendiri juga telah mendapat banyak manfaat dari bantuan dan investasi yang diberikan kepada Indonesia yaitu para investor dari Amerika Serikat selain memperoleh keuntungan dari modal yang ditanamkan di Indonesia, juga telah mengembangkan teknologi atau transfer of technology dari negara maju ke negara berkembang, serta telah dapat memperoleh keunggulan kompetitif dari negara-negara maju lainnya seperti Jepang dan negara-negara Eropa Barat.

A. Perjuangan Indonesia

Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut untuk mengusahakan pengakuan internasional terhadap Wawasan Nusantara pada awalnya mendapat banyak tantangan dari

berbagai negara, tak terkecuali dari Amerika Serikat yang menolak konvensi Hukum Laut tersebut, sehingga masalah tersebut telah memberi warna tersendiri dalam hubungan politik antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Mengenai hal tersebut, maka dalam hubungan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat khususnya dalam bidang politik, Presiden Soeharto sewaktu menerima kunjungan kehormatan Presiden Bush pada tanggal 12 Oktober 1982 di Jakarta menyesalannya yang mendalam karena Amerika Serikat tidak bersedia menandatangani konvensi internasional tentang hukum laut yang telah bertahun-tahun diusahakan melalui perundingan yang panjang.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi yang menyerukan kepada semua negara anggota untuk meratifikasi konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang naskahnya sudah ditandatangani oleh 157 negara termasuk Indonesia di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982. Resolusi disetujui dengan 138 negara mendukung, dua negara menentang (Amerika Serikat dan Turki). Meskipun Amerika Serikat menolak konvensi tersebut, namun tidak semua isi dari konvensi tersebut ditolak oleh Amerika Serikat. Misalnya Amerika Serikat masih menerima isi konvensi mengenai lebar laut wilayah 12 mil laut.

Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut adalah suatu perjuangan yang sangat penting. Perjuangan ini bertujuan untuk menjamin kesatuan dan keutuhan bangsa, kestabilan politik, kemajuan ekonomi, kemantapan bidang pertahanan keamanan, pengadaan dan penyediaan sumber-sumber kekayaan alam bagi kemajuan bangsa yang lebih baik. Karena itu satu-satunya jalan yang paling tepat untuk menjamin kepentingan Indonesia tersebut adalah melalui konsep Archipelago atau Wawasan Nusantara. Perjuangan Konsep Nusantara di luar negeri telah dilakukan dengan berbagai cara seperti mempergunakan forum negara-negara berkembang. Indonesia telah memanfaatkan konpres ini dan hasilnya mendapat pengertian yang cukup baik di kalangan negara-negara Non-Blok terhadap konsep Wawasan Nusantara.

Di pihak Amerika Serikat, karena untuk kepentingan negaranya, maka Amerika Serikat tidak mau menerima konvensi mengenai penambangan dan eksploitasi kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi suatu negara harus di bawah pemantaauan PBB.

Penolakan Amerika Serikat terhadap konvensi Hukum Laut tersebut tidak berarti Amerika Serikat telah menolak pula konsep Wawasan Nusantara Indonesia. Hal ini sesuai dengan keterangan John H. Holdridge, Pembantu menteri luar negeri Amerika Serikat urusan Asia Timur Jauh dan Pasifik atas pertanyaan wartawan setelah selesainya perundingan

Presiden Suharto dengan wakil Presiden Amerika Serikat. Beliau mengemukakan bahwa "in general term we accept the archipelago principles, we dont quarrel whith that". Dengan demikian masalah Wawasan Nusantara menurut Hasan Habib tidak ada masalah, tetapi yang menjadi masalah menurut beliau adalah belum dapatnya Amerika Serikat menerima konvensi Hukum Laut baru yang banyak kaitannya dengan Wawasan Nusantara.

Berbeda dengan perjuangan Hukum Laut Indonesia di forum Internasional, Amerika Serikat selalu mendukung perjuangan Indonesia. Di mana delegasi Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menentang resolusi yang merugikan Indonesia mengenai masalah Timor-Timur .

Pemerintah Amerika Serikat menerima kenyataan bahwa Timor-Timur telah bergabung dengan Indonesia. Namun belum dapat mengakui bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor-Timur telah dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun demikian pemerintah Amerika Serikat lebih memusatkan perhatian pada pembangunan rakyat Timor-Timur.

Sikap pemerintah Amerika Serikat mengenai masalah Timor-Timur tersebut tidak selaras dengan pandangan dan sikap beberapa anggota kongres yang beraliran liberal demokrat dan beberapa media massa lainnya. Pers dan beberapa anggota kongres cenderung memojokkan pemerintah

Indonesia dengan alasan kemanusiaan dan Human Rights. Hal ini disebabkan oleh kurang informasi yang diperoleh oleh sejumlah kalangan yang mempermasalahkan masalah tersebut mengenai pembangunan di Timor-Timur serta keadaan sebenarnya mengenai Timor-Timur, sehingga timbul persepsi yang sering keliru akibat perbedaan pandangan dan kurangnya informasi mengenai keadaan sebenarnya di Timor-Timur.

Itulah sebabnya pemerintah Amerika Serikat dalam melihat masalah Timor-Timur menggunakan istilah "incorporation" dan menghindari istilah "integration" seperti yang dikemukakan oleh Pembantu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Holridge di House Subcommittee on Asia and Pacific Affair mengenai Timor-Timur. Hal ini nampaknya dimaksudkan untuk mengurangi tekanan-tekanan yang datang dari sementara kalangan kongres yang berhaluan liberal yang dikenal sebagai pembela Hak Asasi Manusia.

Menjelang kedatangan Presiden Soeharto ke Amerika Serikat tahun 1982, masalah Timor-Timur yang secara sistematis dihidupkan oleh sementara anggota kongres dan pers Amerika Serikat. Untuk itu Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat pada tanggal 9 Oktober 1982 menghubungi John Holdridge untuk menjajaki sikap pemerintah Amerika Serikat mengenai kegiatan kalangan kongres tersebut. Mereka memperoleh penjelasan bahwa pemerintah Amerika Serikat berketetapan dengan teguh untuk mempertahankan

posisinya mengenai Timor-Timur dan yakin bahwa Indonesia mampu melaksanakan pembangunan di Timor-Timur.

Adanya saling mengunjungi antara pihak Amerika Serikat maupun dari pihak Indonesia baik itu di kalangan pejabat maupun pihak swasta mempunyai arti yang sangat penting bagi perkembangan hubungan kedua negara. Seperti kunjungan Presiden Reagan ke Bali yang mempunyai arti penting dalam usaha pemerintah Indonesia memberi gambaran yang jelas mengenai kebijaksanaan luar negerinya, pandangan Indonesia terhadap masalah-masalah internasional, kebijaksanaan Indonesia mengenai pelaksanaan hak asasi manusia dan lain-lainnya..

Disamping itu semakin banyaknya kunjungan kongres Amerika Serikat ke Indonesia mempunyai dampak yang sangat positif bagi politik luar negeri Indonesia, utamanya menyangkut perjuangan Indonesia mengenai Timor-Timur. Para anggota kongres tersebut telah bertemu dengan pejabat pemerintah Indonesia dan bahkan menyaksikan dari dekat kemajuan masyarakat Timor-Timur setelah berintegrasi dengan Indonesia. Dan pada akhirnya anggota kongres tersebut telah membela Indonesia dalam menghadapi keamanan dari berbagai kalangan mengenai masalah Timor-Timur. Dan sebagai realisasi dengan adanya kunjungan Presiden Reagan pada bulan April 1986 ke Bali, kritik-kritik mengenai pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia

dan isu-isu politik sudah berkurang sama sekali, sebagai salah satu manifestasi dari hubungan yang makin baik antara kedua negara.

Mengenai Intellectual Property Rights (IPR), pemerintah Indonesia menyadari bahwa masalah tersebut perlu ditangani secara berhati-hati dan sungguh-sungguh, terutama dalam rangka kepentingan nasional, khususnya untuk meningkatkan ekspor non-migas Indonesia dan menarik investasi asing. Sedangkan masalah Intellectual Property Rights dengan Amerika Serikat perlu ditangani secara hati-hati, sebab kalau tidak akan dapat mengundang tindakan-tindakan yang dapat merugikan hubungan bilateral Amerika Serikat - Indonesia. Salah satu usaha pihak swasta untuk mendeskreditkan Indonesia adalah adanya gugatan Intellectual Property Rights Alliance (IPRA), agar status Indonesia dalam GSP dicabut, kecuali apabila Indonesia dapat segera memberikan perlindungan IPR tersebut.

Sementara itu pihak Amerika Serikat menyambut baik langkah-langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Indonesia, antara lain dengan akan diajukannya ke DPR RI amandemen RUU hak cipta dan RUU hak patent. Dengan perkembangan yang positif tersebut, pada tanggal 1 April 1987 USTR mengumumkan bahwa Presiden Reagan menunda keputusannya untuk mengadakan Annual Review tentang status.

Indonesia dalam GSP tersebut.

B Kendala Ekonomi dan Politik Hubungan Indonesia - Amerika Serikat

Hubungan ekonomi dan politik antara Indonesia dengan Amerika Serikat sampai saat ini terus berlanjut dan mengalami peningkatan yang cukup berarti. Namun itu tidaklah berarti bahwa hubungan tersebut tanpa kendala. Masih adanya beberapa kendala dalam hubungan kedua negara khususnya dalam bidang ekonomi tidak lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti perkembangan dalam negeri kedua negara, perkembangan ekonomi dan politik Internasional, kebijaksanaan perdagangan kedua negara serta hambatan-hambatan lainnya. Kendala-kendala yang sering mewarnai hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi seperti masalah proteksionisme, kendala dalam usaha ekspor, investasi dan bantuan modal, serta hambatan perdagangan lainnya.

Diantara masalah-masalah yang cukup penting yang dihadapi oleh Indonesia dan Amerika Serikat terutama dalam tahun 80-an adalah masalah proteksionisme. Indonesia sangat prihatin oleh adanya perkembangan di Amerika Serikat yaitu usaha untuk mengatasi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat terutama ekspor tekstil. Jika seandainya rancangan Undang-Undang Proteksionisme atau Jenkins Bill yang telah disampaikan oleh kongres Amerika Serikat ini

dijadikan Undang-Undang, maka akibatnya sangat buruk bagi Indonesia, tidak saja terhadap industri tekstil yang mempekerjakan sekitar dua juta orang, tetapi juga terhadap industri-industri yang berkepentingan lainnya. Di satu pihak keadaan ini akan menimbulkan bertambahnya pengangguran dan tentunya akan berakibat buruk pada stsbilitas politik. Di pihak lain, keadaan ini dapat menimbulkan perasaan kurang senang terhadap Amerika Serikat. Oleh karena itu Indonesia mengharapkan agar pemerintah Amerika Serikat tidak mensyahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

Untunglah dalam perkembangan terakhir rancangan undang-undang tersebut diveto oleh Presiden Reagan. Dengan divetonya rancangan undang-undang Jenkins Bill tersebut maka apa yang selama ini ditekankan oleh pemerintah Reagan mengenai perdagangan bebas akan semakin terbukti. Meskipun Pemerintahan Reagan tidak menghendaki adanya proteksionisme, beberapa kalangan di Amerika Serikat masih mempermasalahkannya termasuk anggota-anggota kongres Amerika Serikat. Desakan semakin kuat dilancarkan oleh berbagai pihak di Amerika Serikat agar membatasi produk-produk negara berkembang, kalau perlu menghalanginya masuk karena dianggap mengganggu pasar dan industri Amerika Serikat. Akhirnya Pemerintah Reagen meminta jasa baik dari produsen tekstil/pakaian jadi beberapa negara termasuk

Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat juga menginginkan pemerintah Indonesia melepaskan kekangan-kekangan bagi 130 jenis produknya yang dikenakan kuota, serta hambatan tarif dasar masuk Indonesia. Amerika Serikat juga meminta dicabutnya bea masuk untuk makanan dan pembatasan lainnya. Sejauh ini pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan hal ini dan akan berusaha mewujudkannya.

Pada tahun 1982 konsumsi tekstil dan pakaian jadi di Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 6 persen. Pemulihan ekonomi pada tahun 1983 membawa serta peningkatan permintaan akan tekstil dan pakaian jadi. Departement of Commerce pada waktu itu memperkirakan bahwa konsumsi tekstil dan pakaian jadi di Amerika Serikat akan meningkat dengan 5 persen untuk tahun 1983 dan dengan 2 persen pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu selama enam bulan pertama tahun 1983 terjadi peningkatan impor tekstil dan pakaian jadi sebesar 22,5 persen. Perkembangan ini dengan sendirinya akan meningkatkan tekanan industri dalam negeri Amerika Serikat untuk membatasi impor tekstil dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pada pertengahan tahun 1983 untuk pertama kalinya kuota impor tekstil dilaksanakan terhadap Indonesia, yaitu untuk kategori 340 (kemeja pria), kategori 347 dan 348 (celana wanita dan pria) dan kategori 335 (jaket dan jas wanita).

Melalui suatu perundingan besarnya kuota untuk kategori-kategori diatas dapat disepakati. ss)

Perundingan kuota ekspor tekstil diatas pertama kali diadakan pada bulan pembreuari 1984 di Washington dan dilanjutkan pada bulan Mei 1984 di Jakarta tanpa diperoleh kesepakatan mengenai dua kategori, yaitu 319 dan 341. Karena ketidaklancaran perundingan, Indonesia mengadakan masalah kuota ekspor ini kepada TSB atau Textile Surveillance Body yang bernaung dibawah GATT (General Agreement on Trade and Tariff) yang berkedudukan di Jenewa. Dalam sidang TSB bulan oktober 1984 dihasilkan tiga rekomendasi yang diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan selanjutnya dengan Amerika Serikat. Ketiga rekomendasi tersebut adalah :

- a. Alasan Amerika Serikat bahwa eksport tekstil dan pakaian jadi Indonesia mengganggu pasar Amerika Serikat adalah tidak benar.
- b. Amerika Serikat tidak mempertimbangkan Indoensia sebagai negara berkembang dan sebagai pendatang baru.
- c. Dalam menetapkan basis kuota Amerika Serikak tidak memperhatikan volume ekspor Indonesia sebelumnya.

Selain masalah kuota diatas, ekspor tekstil dan pakaian jadi Indonesia mengalami dua persoalan lain yaitu masalah Countervailing Duty atau bea kompensasi dan ketentuan baru mengenai pengaturan kriteria (rules) of

oringin, atau surat keterangan asal dari tekstil yang diekspor ke Amerika Serikat. Countervailing Duty terhadap sejumlah produk tekstil Indonesia diajukan oleh sejumlah kalangan di Amerika Serikat dengan alasan bahwa dalam perdagangan tekstil di Indonesia tidak berlaku fair, karena memberikan berbagai macam subsidi. Secara teoritis, Amerika Serikat dapat mengenakan CVD tersebut tanpa perlu membuktikan bahwa industri dalam negeri yang bersangkutan mengalami kerugian, terutama karena Indonesia tidak termasuk penandatanganan Code on Subsidies and Countervailing Duties dalam rangka GATT yang sampai batas tertentu memberikan perlindungan. Amerika Serikat memberikan batas waktu sampai tanggal 3 maret untuk menandatangani Code tersebut, dan mendesak Indonesia mengadakan perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat untuk mencabut fasilitas subsidi seperti sertifikat ekspor dan kredit ekspor. Perjanjian yang ditandatangani di Washington pada tanggal 28 pebruari 1985 menyatakan bahwa penghapusan sertifikat ekspor dan kredit ekspor per 1 April 1986 dan kredit ekspor secara bertahap ditiadakan mulai 1 april 1987 hingga hilang sama sekali pada tahun 1990. Pada tahun 1985 tepatnya pada tanggal 4 maret 1985 di Jenewa pemerintah menandatangani ketentuan mengenai Code on Subsidies and Countervailing Duties. Sedang mengenai surat keterangan asal dari tekstil yang

diekspor dari Amerika Serikat yang berlaku sejak 1 November 1984 pelaksanaannya semakin rumit. Tindakan-tindakan Amerika Serikat ini mendapat protes dari berbagai negara dan dilihat sebagai pencerminan sikap Amerika Serikat sebagai proteksionistis.

Sedangkan mengenai kendala-kendala dalam usaha promosi ekspor khususnya usaha promosi ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat, terjadi baik di Indonesia sendiri maupun di daerah pasaran Amerika Serikat. Kendala yang ada di Indonesia antara lain seperti jadwal pelayaran yang kurang menentu, biaya angkutan yang mahal, belum adanya kontinuitas suply dan kualitas yang kurang memenuhi persyaratan untuk bersaing dipasang Amerika Serikat, kurangnya koordinasi dalam penawaran produk ekspor non-migas Indonesia sehingga harga komoditi lebih banyak ditentukan oleh pembeli/broker.

Sedangkan kendala di dalam negeri Amerika Serikat sendiri dalam usaha promosi ekspor produk non-migas adalah masalah proteksionism, meskipun Amerika Serikat masih merupakan pasaran yang terbuka. Semakin membesarnya defisit negara perdagangan dan anggaran belanja Amerika Serikat memungkinkan bertambahnya hambatan perdagangan dengan adanya non-tariff barriers seperti: quota, voluntary restriction, asas timbal balik, countervalling duties dan hambatannya lainnya. Disamping itu hambatan

yang juga dihadapi dalam usahapeningkatan ekspor non-migas khususnya hasil pertanian dan perikanan adalah persyaratan kesehatan dan ketentuan minimal yang diberikan oleh Food and Drug Administration (FDA), yang banyak melakukan penahanan atas beberapa komoditi ekspor Indonesia antara lain : kopi, udang, cassia, vera, lada, pala dan kacang-kacangan.

Selain kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam hubungannya dengan Indonesia dalam bidang perdagangan, Amerika Serikat juga mengalami kendala-kendala dalam hubungannya perdagangan dengan Indonesia seperti : Tariff dan pungutan lainnya dimana Indonesia dianggap mempunyai tingkat tariff yang tinggi terutama untuk barang sugar dan confectionary 40 persen, chocolate confectionary 66 persen dan adanya berbagai bea/pungutan untuk film impor. Diakui oleh pihak Amerika Serikat bahwa mereka sulit mengukur berapa kerugian yang diderita Amerika atas adanya tarif yang dianggap tinggi tersebut.

Indonesia dianggap melakukan beberapa hambatan impor sebagai berikut:

i. Tariff Dan Pungutan Lainnya

Tingkat tariff di Indonesia masih dianggap tinggi oleh pihak Amerika Serikat terutama untuk barang sugar confectionary 40 %, chocolate confectionary 66%, almond 500 rupiah per-kg dan adanya berbagai

bea/pungutan untuk film impor. Diakui oleh pihak Amerika Serikat bahwa mereka sulit untuk mengukur berapa besar kerugian yang diderita Amerika Serikat atas adanya tarif yang dianggap tinggi tersebut dengan kata lain tidak bisa dibuktikan bahwa menurunnya ekspor Amerika Serikat untuk beberapa barang tersebut disebabkan oleh tarif yang tinggi. Diproyeksikan bilamana tarif tinggi ini bisa dihapuskan ekspor almond ke Indonesia. Ekspor almond Amerika Serikat keseluruh dunia dalam tahun 1985 hanya mencapai US\$ 10 juta.

ii. Pembatasan impor

Amerika Serikat menyatakan bahwa Indonesia melakukan pembatasan impor buah-buahan, sayur, daging, minuman mengandung alkohol dan barang mewah. Adanya pembatasan impor tersebut dianggap merugikan Amerika Serikat terutama untuk ekspor barang seperti citrus segar, anggur, kismis, peaches, buah dalam kaleng dan daging ayam kalkun. Untuk itu Amerika Serikat akan memintakan kompensasi kepada GATT, bila mana Indonesia tidak akan melakukan langkah perbaikan dengan menghapuskan pembatasan impor tersebut yang dianggap melanggar ketentuan GATT. Memperhatikan barang yang dinyatakan oleh pihak Amerika Serikat

sebagai menurun eksportnya ke Indonesia, sebetulnya tidak bisa dibuktikan bahwa penurunan tersebut akibat adanya pembatasan tersebut, tapi pihak Amerika Serikat tampaknya kurang memperhatikan faktor seperti budaya, agama dan tingkat pendapatan umumnya masyarakat Indonesia, sehingga bisa dibuktikan apakah betul permintaannya cukup besar di Indonesia.

iii. Perizinan Ekspor

Dalam hal; perizinan impor diakui telah ada perbaikan dengan diambilnya serangkaian kebijaksanaan pemerintah Indonesia yaitu paket 6 Mei 1986, mengurangi hambatan impor untuk perusahaan yang memproduksi barang untuk ekspor dan mendorong industri. Kebijakan 25 oktober 1986, menghapus hambatan non tariff untuk banyak hambatan hasil industri dan kebijakan 15 januari 1986, penghapusan peraturan impor untuk bahan baku industri tekstil dan barang dari baja. Ketentuan yang masih dianggap termasuk hambatan berupa perizinan impor adalah adanya peraturan importir terdaftar, importir produsen, produsen importir dan agen tunggal. Walaupun demikian secara tepat tidak bisa ditentukan kerugian atau pengaruhnya terhadap kepentingan Amerika Serikat.

iv. Hambatan Bea Cukai

Kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam usaha melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri terutama tentang ketentuan keharusan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal dan melakukan hambatan impor atas industri yang telah mampu memproduksi barang tertentu serta telah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, dianggap oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai tindakan hambatan bea cukai.

v. Standards, Testing, Labelling And Certification

Indonesia dianggap memperlakukan industri farmasi kurang adil antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan asing. Tindakan kurang adil tersebut dicontohkan dengan memperlambat persetujuan untuk peredaran/pemasaran sesuatu barang baru yang dianggap memberikan kesempatan kepada industri didalam negeri untuk memperkenalkan dan mempromosikan lebih dulu produk sejenis. Ketentuan lain yang dianggap menghambat yaitu adanya persyaratan untuk bisa mendaptar prescription pharmaceuticals harus tergolong teknologi tinggi dan produk tersebut benar hasil penemuan/riset dari perusahaan itu sendiri.

vi. Subsidi Ekspor

Pada bulan pebruari 1985 Indonesia telah menandatangani perjanjian countervalling duty dengan Amerika Serikat dan secara konsekwen Indonesia sejak tahun 1986 telah menghapuskan sertifikat ekspor dan kembali pada sistem duty drawback yang diperbolehkan menurut konsensus perdagangan internasional dan sejak 1 april 1987 telah dihapuskan kemudahan kredit ekspor yang dianggap sebagai subsidi ekspor. Dalam hal subsidi ekspor ini hanya tinggal ketentuan tentang tingkat bunga kredit ekspor yang lebih rendah dari tingkat bunga umum yang masih berlaku dan menurut konsensus dengan Amerika Serikat akan dicabut pada tahun 1989.

Walaupun demikian diakui oleh pihak Amerika Serikat bahwa jumlah subsidi tersebut berdasarkan hasil penelitian mereka adalah kecil.

vii. Kurang Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights

Dalam hal perlindungan terhadap Intellectual Property Rights, Indonesia telah melakukan hal yang dianggap cukup baik terutama dengan telah diundangnya U U Hak Cipta pada bulan September 1987 dan adanya sikap tegas dan keras pemerintah Indonesia dalam hal menindak pelanggaran atas merek dagang. Hanya dalam

hal hak paten, prosedur perlindungannya dianggap kurang menjamin kecepatan penyelesaiannya. Pemerintah Amerika Serikat menghendaki agar Indonesia secepatnya membuat perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat mengenai hak cipta.

viii. Hambatan Di Bidang Jasa

Kebijaksanaan yang dianggap sebagai hambatan yang termasuk dalam kelompok hambatan dibidang jasa, yaitudalam bidang perbangkan, asuransi, iklan, dan konsultan. Bank asing hanya boleh mempunyai satu kantor pusat dan satu cabang didalam ibukota negara . Beberapa yang tidak boleh dilakukan, yaitu maintaining savings accounts, lending funds, issuing guarantees atau opening letters of credits untuk perusahaan di luar Jakarta. Untuk perusahaan asuransi diharuskan untuk joint-venture dan pihak Indonesia harus memegang peranan yang lebih besar dalam perusahaan dan kegiatannya juga hanya dibatasi dijakarta. Perusahaan asing tidak diisinkan dibidang industri iklan, biro, hukum, mendirikan cabang untuk distributor filmdan leasing barang buatan asing. Penetapan bea, pajak dan pungutan lainnya juga dianggap merupakan hambatan bagi perusahaan film asing.

ix. Hambatan Investasi

Dalam investment barriers ini diakui telah banyak perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti paket 6 mei 1986, kebijaksanaan 25 oktober 1986 dan kebijaksanaan 24 desember 1987, walaupun demikian pihak Amerika Serikat masih menghendaki tindakan yang lebih liberal dari Indonesia.

Hambatan lain adalah pembatasan impor. Amerika Serikat menyatakan bahwa Indonesia melakukan pembatasan impor buah-buahan, sayur, daging, minuman, mengandung alkohol dan barang mewa. Adanya pembatasan impor tersebut dianggap merugikan Amerika Serikat terutama untuk ekspor barang seperti citrussegar, anggur, kismis, peaches, buah dalam kaleng dan daging ayam kalkum. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam usaha melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri terutama ketentuan tentang keharusan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal dan melakukan hambatan impor dan atas industri yang telah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, dianggap oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai tindakan hambatan bea cukai. Dan kebijaksanaan yang dianggap sebagai hambatan yang termasuk dalam hambatan kelompok di bidang jasa, yaitu dalam bidang perbankan,

asuransi, iklan dan konsultan. Itulah beberapa masalah yang dihadapi oleh Amerika Serikat maupun oleh Indonesia dalam hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua negara. Memang untuk mencapai kutub hubungan yang sederajat dan harmonis tidak sedikit hambatan - hambatan yang harus dihadapi oleh kedua negara. Usaha-usaha telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengatasi hambatan perdagangan dan investasi dengan mengadakan perundingan-perundingan bilateral dan memperbaharui ketentuan-ketentuan lama yang dianggap menghalangi hubungan perdagangan antar kedua negara. Seperti kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi investmen barriers dilakukan dengan mengeluarkan paket kebijaksanaan 6 mei 1986, kebijaksanaan 25 oktober 1986, dan kebijaksanaan 24 desember 1987. Dalam hal perlindungan terhadap Intelektual Property Rights, Indonesia telah melakukan langkah yang dianggap cukup baik terutama dengan diungkapkannya Undang-undang hak cipta pada bulan september 1987. Amerika Serikat juga telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah perdagangan dan investasi dengan Indonesia dengan memveto rancangan undang-undang proteksionisme. Dan dalam rangka usaha mengatasi hambatan perdagangan yang terjadi, telah dibentuk United States Indonesian

Advisory Commitee, dan beberapa lembaga konsultasi dalam mengatasi segala hambatan yang ada. Sementara itu mengetahui masalah yang dirasakan oleh para investor Amerika yang menyebut pelaksanaan hukum dan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang tidak konsisten yang merupakan salah satu faktor yang tidak mengarahkan investasi asing di Indonesia sejauh ini pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan menciptakan suasana dan lingkungan serta kepastian hukum yang mengundang investasi melalui melalui terpeliharanya pasar modal yang bebas dan terbuka, kebijaksanaan moneter dan fiskal yang memadai.

Dalam bidang politik kendala-kendala dalam hubungan kedua negara adalah masih terdapatnya isu politik dan concern dari kalangan kongres yang dikemukakan selama ini ditujukan pada kasus-kasus di Timor-Timur, undang-undang tentang Organisasi masyarakat, pelaksanaan terhadap hukuman mati terhadap pelaku G-30-/PKI, larangan masuk terhadap wartawan Barbara Crosette, telah menjadi suatu kendala dalam menjalin hubungan politik yang harmonis antara Indonesia dengan Amerika Serikat pada periode 1980 - 1990.

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat adalah

menghadapi kritik tersebut dengan mengadakan pendekatan-pendekatan secara tertutup kepada pihak-pihak yang bersangkutan antara lain : dengan mengadakan pertukaran pikiran, penjelasan lisan, maupun tertulis serta mengirimkan bahan-bahan informasi yang tepat.

Salah satu upaya yang efektif adalah memanfaatkan informasi atau pandangan positif dari pihak ketiga. Tanggapan secara terbuka tidak dilakukan dengan pertimbangan bahwa cara tersebut dikuatirkan akan membawa masalah ke dalam suatu "open front" yang justru akan counter productive. Hal tersebut juga sejalan dengan kebijaksanaan administrasi pemerintahan Presiden Reagan pada waktu itu yang dalam menghadapi masalah hak asasi manusia dengan Indonesia yaitu secara " quite diplomacy".

Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia masih merupakan keprihatinan sementara kalangan Amerika Serikat. Kritik-kritik mengenai hak asasi manusia masih dilancarkan oleh sementara Organisasi Non-Pemerintah, The Asia Watch dan kalangan kongres, meskipun selama dua tahun terakhir 1987 dan 1988 kritik-kritik tersebut agak berkurang, namun di tahun-tahun mendatang kritik-kritik tersebut dapat muncul kembali terutama dari kalangan yang ingin mendiskreditkan Indonesia. Dan kritik hak asasi manusia mengenai pelanggaran hak kaum buruh Amerika yaitu

AFL-CIO kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk mencabut pemberian GSP kepada Indonesia apabila tidak dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kaum buruh tersebut. Review ini dilancarkan pada bulan April 1988. Kedua masalah ini yang menyangkut hak asasi manusia merupakan kendala dalam menjalin hubungan politik kedua negara, yang apabila tidak ditangani dengan dialog dan adanya saling pengertian kedua negara dapat menjadi masalah serius baik pada periode tahun 1980-an dari hubungan kedua negara maupun pada masa yang akan datang.

Masalah-masalah tersebut di atas, khususnya yang menyangkut hak asasi manusia dan lingkungan hidup timbul akibat ada perbedaan pandangan dan pelaksanaan hak asasi manusia dan lingkungan hidup di Indonesia dengan pandangan dan pelaksanaan hak asasi manusia dan lingkungan hidup versi Amerika Serikat.

C Prospek Kerjasama Ekonomi Politik Indonesia - Amerika Serikat

Prospek hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat di masa yang akan datang cukup baik dan intensitasnya makin meningkat. Hal ini didasarkan pada hasil-hasil yang dicapai dari hubungan dan kerjasama kedua negara yang makin baik dan meningkat khususnya dalam hubungan dan kerjasama ekonomi dan juga bidang-bidang lain

yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Dalam bidang ekonomi dan perdagangan terlihat peningkatan ekspor kedua negara meningkat. Khusus bagi Indonesia peningkatan jumlah dan nilai eksportnya ke Amerika Serikat sangat pesat dan menjadikan Amerika Serikat sebagai pasaran yang potensial bagi produk-produk Indonesia dan sekaligus menjadikan Amerika Serikat sebagai partner dengan kedua tersebut disamping Jepang serta sebagai pasaran yang potensial bagi produk-produk ekspor baik itu ekspor migas maupun ekspor non migas, yang saat ini semakin meningkat volumenya.

Dengan adanya kebijaksanaan deregulasi dan birokratisasi di Indonesia semakin kuatnya keinginan Amerika Serikat dalam memajukan perdagangannya dengan Indonesia, maka pengembangan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara semakin cerah seiring dengan perkembangan ekonomi kedua negara.

Meskipun pada masa yang akan datang masalah proteksional masih tetap ada, namun masalah tersebut akan dapat diatasi dengan dialog yang intensif antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan keinginan kedua negara menciptakan perdagangan bebas, maka kedua negara akan dapat menikmati keuntungan bila dibanding dengan suatu perdagangan yang proteksionis. Dan hambatan-hambatan lain

seperti tarif, kuota dan pembatasan-pembatasan lain dalam perdagangan kedua negara juga dapat teratasi dengan kebijaksanaan ekspor dan impor yang kompetitif dan berkualitas.

Mengenai investasi dan bantuan modal perkembangannya saat ini cukup pesat dan diharapkan pada masa yang akan datang akan lebih meningkat. Dengan terpilihnya Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, Indonesia mengharapkan agar kebijaksanaan pemerintah Amerika Serikat tidak banyak merubah khususnya komitmen bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia. Dan Indonesia perlu mengantisipasi terhadap setiap perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat sebagaimana Amerika Serikat selalu mengantisipasi setiap perkembangan yang ada di Indonesia.

Membaiknya iklim investasi dan perangkat hukum saat ini di Indonesia mengakibatkan prospek bagi penanam modal Amerika Serikat di Indonesia semakin meningkat. Hal ini akibat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan kesadaran politik semakin meningkat pula.

Dalam hubungan politik antara Indonesia dengan Amerika Serikat prospeknya cukup baik sampai saat ini belum ditemukan masalah besar yang dapat memutuskan hubungan yang telah ada. Adanya saling pengertian antara kedua negara mengenai kebijaksanaan politik dan adanya

komunikasi terbuka antara lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah kedua negara akan dapat menghindarkan kesalahpahaman dan perbedaan pandangan.

Pada masa yang akan datang kebijaksanaan pemerintah Amerika Serikat Bill Clinton mengenai demokrasi dan hak asasi manusia serta lingkungan hidup, kiranya perlu mendapat perhatian bagi Indonesia agar dapat meningkatkan hubungannya dengan Amerika Serikat. Demikian pula Indonesia mengharapkan pemerintah Amerika Serikat dapat memahami kondisi objektif Indonesia sebagai negara berkembang yang menjalankan sistem politik berdasarkan falsafah negaranya dengan kondisi objektif yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1. Kesimpulan

1. Hubungan Bilateral Indonesia - Amerika Serikat telah berlangsung cukup lama dan dalam rentang waktu hingga sekarang hubungan tersebut telah berkembang dengan cukup baik. Meskipun pada waktu-waktu yang lampau hubungan kedua negara mengalami pasang surut, tetapi kini terus berkembang kearah hubungan yang lebih positif.
2. Hubungan yang baik itu pada dasarnya timbul dari adanya saling membutuhkan antara kedua negara. Indonesia membutuhkan Amerika Serikat sebagai sumber teknologi, modal, dan tempat pemasaran hasil industrinya di samping peran Internasional Amerika Serikat yang besar. Sebaliknya Amerika Serikat membutuhkan Indonesia sebagai sumber bahan baku untuk industrinya, pemasaran hasil industrinya, kepentingan politis dan geostrategis Indonesia yang cukup baik, merupakan faktor-faktor mendasar dalam hubungan kedua negara.
3. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi meliputi hubungan dan kerjasama perdagangan, investasi, dan bantuan keuangan Amerika Serikat

kepada Indonesia, dimana hubungan tersebut intensitasnya makin meningkat.

Dalam bidang politik hubungan kedua negara telah berlangsung cukup lama terutama pada masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, dimana Amerika banyak memberi dukungan dan bantuan pada Indonesia dalam proses mencapai kemerdekaan, dan hubungan tersebut hingga kini masih tetap berjalan baik dan harmonis.

4. Seperti lazimnya hubungan kedua negara juga tidak luput dari kendala-kendala. Kendala-kendala dalam bidang ekonomi seperti masalah dalam kebijaksanaan perdagangan yang sering menimbulkan masalah ekonomi sekaligus unsur politik. Di samping itu masalah-masalah hambatan ekspor dan impor dan pembatasan - pembatasan lain dalam perdagangan serta investasi dan bantuan modal yang sering menimbulkan dampak politik merupakan masalah-masalah dalam hubungan ekonomi kedua negara.
5. Kendala-kendala dalam hubungan politik antara kedua negara meliputi pandangan dan konsepsi yang sering timbul terhadap beberapa masalah-masalah internasional, serta masalah-masalah terhadap kepentingan nasional kedua negara yang tidak lain disebabkan oleh perbedaan falsafah negara dan kebijaksanaan

dalam dan luar negeri.

6. Prospek hubungan Indonesia - Amerika Serikat pada masa datang cukup baik terlihat dari meningkatnya hubungan ekonomi dan politik antara kedua negara dan peningkatan pada bidang-bidang lain seperti adanya hubungan kebuayaan, pendidikan, dan pertukaran kunjungan baik instansi pemerintah maupun swasta. Dan hubungan baik tersebut diharapkan akan makin baik pada masa-masa yang akan datang.

2. Saran - Saran

1. Dalam mencapai hubungan yang sederajat dan harmonis kedua negara diharapkan dapat meningkatkan dialog dan pendekatan terhadap cara berfikir dan cara hidup masing-masing sehingga akan melahirkan saling pengertian yang lebih baik.
2. Dalam masalah ekonomi Amerika Serikat sebagai negara maju diharapkan agar dapat memperlakukan Indonesia secara asimetris, tidak bersifat timbal balik, dan mendapatkan perhatian dan perlakuan yang memadai dalam ekonomi dan perdagangan serta investasi dan bantuan modal sampai Indonesia pada suatu saat cukup kuat untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat atas dasar yang lebih bersamaan.

3. Amerika Serikat diharapkan agar lebih membuka pasarnya terhadap produk-produk dari Indonesia dalam usaha mewujudkan perdagangan yang "open", "free" and "fair", karena dengan perdagangan yang terbuka, bebas dan jujur maka berbagai pihak tidak banyak dirugikan dalam hubungan perdagangan dan ekonomi, khusus negara berkembang seperti Indonesia yang sangat tergantung pada ekspor.
4. Masa depan dunia terutama sekali masa depan kawasan pasifik telah mengembangkan keadaan yang memungkinkan jalinan kerjasama yang semakin erat antara Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat harus dapat bekerjasama lebih baik lagi untuk kepentingan kedua belah pihak dan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang abadi di kawasan itu.

DAFTAR KUTIPAN

1. Titian. Hubungan Indonesia - Amerika Serikat. USIS. Jakarta. 1987. No.3. hal.6.
2. Ibid. hal.7.
3. Budiono Kusumohamidjoyo. Hubungan Internasional. Kerangka Studi Analisis. Bina Cipta. Jakarta. hal.95-98
4. Sumarsono Moestiko. Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa. Sinar Harapan. Jakarta. 1985. hal.12
5. Joan Edelman Spero. The Politics Of International Economics. George Allen & Unwin, Ltd. London. 1977. hal.4.
6. Juwono Sudarsono. Politik dan Pembangunan. Rajawali. Jakarta. 1982. hal.25.
7. Titian Op.Cit. hal.6-7.
8. Titian. Op.Cit. hal.6.
9. Hamid Alhadad. Ceramah Hubungan Indonesia - Amerika Serikat Litbang Deplu. Jakarta. 1987. hal.3.
10. William L. Bradley dan Mughtar Lubis. Dokumen-Dokumen Pilihan Tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1990. hal.15.
11. Titian. Op.Cit. hal.7.
12. Hamid Alhadad. Op.Cit. hal.16.
13. Kirdi Dipoyudo. Garis-garis besar Politik Luar Negeri Indonesia. Analisis CSIS. Jakarta. 1989. hal.50.
14. Ibid. hal.53.

15. Litbang Deplu RI. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaannya Dewasa ini. Jakarta. 1982. hal. 3.
16. Nurul Qoma. Kecenderungan Politik Luar Negeri Amerika Serikat. Menuju kepada Sistem Bipolarisme. Suatu Penilaian. Fisip. UGM, Yogyakarta, 1992. hal. 63.
17. Ibid. hal. 67.
18. Yusuf Wanandi. Peranan Amerika Serikat di Kawasan Pasifik Analisa CSIS. 1990-10, hal. 881.
19. Lie Tek Tjeng. Studi wilayah Pada Umumnya. Asia Tenggara Pada Khususnya. Bandung. Alumni. hal. 117-118. 1981.
20. Ronald Nangoi. Sikap Amerika Serikat Terhadap Keamanan Asia Tenggara. Analisa. CSIS. 1981-8. hal. 8.
21. Juwono Sudarsono . Op . Cit . hal . 25
22. Wiilliam L. Bradley dan Mochtar Lubis. Op. Cit. hal. 153-154.
23. Titian. Op. Cit. hal. 8.
24. Laporan Departemen Perdagangan RI. tahun 1990.
25. Laporan Tahunan KBRI di Jakarta tahun 1984/1985. hal. 124.
26. Bussiness News tanggal 24 Februari 1986 hal. 13
27. Titian. Op. Cit. hal. 8.
28. Laporan tahunan KBRI tahun 1985/1986. hal. 125-126.
29. Ibid. Hal. 128-129.
30. Laporan Tahunan KBRI tahun 1986/1987. hal. 55-56.
31. Mochtar Kusumaatmadja . Hubungan Bilateral antara Indonesia Amerika Serikat. Suatu Pandangan dari Jakarta. Jurnal LN. Juli 1986. hal. 25.

32. Majalah KADIN Indonesia No.3. th. VIII/1987.hal.65.
33. Laporan Tahunan KBRI tahun 1987/1988. hal.148-149.
34. Ibid. hal. 50-51.
35. Tinjauan Ekonomi Bank BNI 46. No.120. Mei-Juni 1985.
hal.5.
36. Ibid. hal.6.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

1. Gani, Roeslan Abdul. 1985. Indonesia Menatap Masa Depan. PT. Merdeka Sarana Utama. Jakarta,
2. Gill, Richard T. 1983. Ekonomi dan Pembangunan Dulu dan Sekarang. (cetakan pertama). Ghalia Indonesia. Jakarta.
3. Hetne, Bjorn. 1985. Ironi Pembangunan di Negara Berkembang Sinar Harapan. Jakarta.
4. Holsty, K.J. 1987. Politik Internasional. Kerangka Analisis. Terjemahan. Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta.
5. Kusumohamidjoyo, DR. Budiono. 1980. Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis. Bina Cipta. Jakarta.
6. Lindert, Peter H. 1983. Ekonomi International (terjemahan). Erlangga. Jakarta.
7. Mc.Clellan A. 1981. Ilmu Hubungan International, Kerangka dan Sistem. Rajawali Press. Jakarta.
8. Moestiko, Soemarsono. 1985. Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa. Sinar harapan. Jakarta.
9. Nasution, Dachlan. 1984. Perang dan Damai Dalam Wawasan International. Remaja Karya. Bandung.
10. Prawirasaputra, Supena. 1984. Politik Luar Negeri Indonesia. Remaja Karya. Bandung.
11. Qqmar, Nurul. 1982. Kecenderungan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Menuju Kepada Sistem Bipolarisme, suatu penjajakan. Fisip UGM. Yogyakarta.